

Analisis Diskursus Rasisme Mahasiswa Papua di Kota Surabaya

Yanius Kogoya

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
Yanius.17040564086@mhs.unesa.ac.id

M. Jacky

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
jacky@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini menganalisis ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, dengan menggunakan konsep dan teori power of knowledge Foucault dan metode analisis Foucauldian. Teknik analisis data dengan mencermati statement-statement subjek baik dengan wawancara maupun melalui pernyataan di media. Hasil penelitian ini menghasilkan delapan diskursus yang mencerminkan ideologi subjek. Diskursus resmi Pertama, diskursus pemerintah resmi “Otonomi Khusus”, “Pembangunan”, “Kelompok Kriminal Bersenjata / teroris”, diskursus resmi ini melegitimasi melalui akselerasi pembangunan dan marginalisasi kelompok oposisi. Kedua, diskursus elit politik pusat “Papua Kondusif”, “Keadilan”, “Persatuan”, “Otonomi Khusus”, “Diperhatikan Secara Komprehensif”, “Papua Bagian Dari Integral NKRI”, “Otonomi Sebagai Solusi”, elit politik menyanjung lidah korban, sumultan oportunis. Ketiga, pelaku rasisme “Monyet” “Provokasi”, “Hoak”, kelompok yang mereproduksi diskursus rasisme politik. Keempat, diskursus masyarakat pro-integrasi; “Satu-Kesatuan”, “Cinta Damai”, “Papua Bagian Dari Indonesia”, gerakan pro-integrasi ingin tetap dalam bingkai NKRI. Diskursus alternatif lain, lanjut kelima, diskursus mahasiswa korban “Kami Ciptaan Tuhan Bukan Monyet”, “Ormas Reaksioner”, “Keadilan”, diskursus alternatif korban menolak kelainan dan menuntut penegakkan konstitusi. Keenam, diskursus Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) “Ketidakadilan”, “Tolak Otonomi Khusus”, “Papua Merdeka”, gerakan AMP subversi terhadap ideologi dominan, sekaligus gerakan refreedom Papua merdeka. Ketujuh, diskursus masyarakat Papua anti-rasisme “Otonomi Khusus Habis Papua Merdeka”, “Kami Bukan Bangsa Monyet, Kami Manusia”, “Mobilisasi”, diskursus aspirasi masyarakat Papua ingin emansipasi dari korban diskursus. kedelapan Counter discourses objektif “Persoalan Internasional”, “Korban Diskursus”, “Hak Asasi Manusia/HAM”, “New Kind Of Nationalism”, “Ketidakadilan”, “Bangsa ini Tidak Suka Sejarah”, konter diskursus pandangan kaum intelek dari pinggiran kekuasaan. Dalam penelitian ini ujaran rasisme “Monyet” sebagai pintu masuk dalam analisis pergulatan ideologi dominan dan ideologi subordinasi serta counter discourses.

Kta kunci: *Diskursus, Power/Knowledge. Rasisme Monyet, Struggle Ideology*

Abstract

The purpose of this study to analyze racism speech against Papuan students in Surabaya, using the concepts and theory of Foucault's power of knowledge and Foucauldian analysis methods. Data analysis techniques by looking at the statements of the subject either by means of interviews or through statements in the media. The results of this study produce eight discourses that reflect the ideology of the subject. Official Discourse First, the official

government discourse "Special Autonomy", "Development", "Armed Criminal Groups / terrorists", this official discourse legitimizes through accelerated development and marginalizes opposition groups. Second, the discourse of the central political elite "Papua is Conducive", "Justice", "Unity", "Special Autonomy", "Comprehensive Attention", "Papua is Part of the Integral of the Republic of Indonesia", "Autonomy as a Solution", political elites address victims opportunistly. When, racists "Monkey" "Provocation", "Hoak", a group that reproduces the discourse of political racism. Fourth, the discourse of the pro-integration society; "Unity", "Love of Peace", "Papua is part of Indonesia", the pro-integration movement wants to remain within the framework of the Republic of Indonesia. Another alternative discourse, continued fifth, is the discourse of student victims of "We Are God's Creations, Not Monkeys", "Reactionary Organizations", "Justice", the alternative discourse of victims rejecting abnormalities and demanding constitutional enforcement. Sixth, the discourse of the Papuan Student Alliance (PSA) "Injustice", "Reject Special Autonomy", "Free Papua", the PSA movement of subversion of the dominant ideology, as well as the free Papua refreedom movement. The goal is the discourse of the Papuan anti-racism "Special Autonomy After Free Papua", "We Are Not a Monkey Nation, We Are Human", "Mobilization", the discourse of the Papuan people's aspirations for emancipation from the victims of discourse. eighth Counter discourses objectively "International Issues", "Victims of Discourse", "Human Rights / HR", "New Kind Of Nationalism", "Injustice", "This Nation Does Not Like History", a counter discourse from the views of intellectuals from the margins of power. In this research, the racism utterance of "Monkey" is an entry point in the analysis of the struggle between dominant ideologies and ideologies of subordination as well as counter discourses.

Key words: *Discourse, Power / Knowledge. Monkey Racism, Struggle Ideology*

PENDAHULUAN

Rasisme terhadap mahasiswa Papua kembali menjadi diskursus politik. Ketika diskursus menjadi diskursus politik, maka adanya permainan ideologi dominan untuk membungkam ideologi subordinat. Kekuasaan dominan senantiasa mengisih setiap celah untuk memperkuat dan mengukuhkan ideologi kekuasaan dominan. Bagian yang lain, mempelantingkan mereka yang secara ideologi tidak berdaya (inferior) dengan sarana diskursus rasisme yang bernuansa ideologi politik. fakta aktual, ada konsekuensi diskursus rasisme menimbulkan guncangan yang luar biasa di Indonesia serta menjadi ajang kepentingan politik para elitis dalam memproduksi dan mereproduksi diskursus. Kedatangan pemerintah pusat dan pemerintah (Jawa timur dan Provinsi Papua) daerah secara berbondong-bondong untuk menyelesaikan

persoalan yang terjadi di lapangan. Biar bagaimanapun di satu sisi, mereka merupakan elit politik yang tentu memiliki kepentingan (partikulatif) di posisi mereka sekaipun diskursus mereka mengakui di publik bahwa memiliki motif murni untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.

Korban rasisme berbeda. Korban tidak hanya mahasiswa saja, melainkan juga Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Berdasarkan data observasi di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa korban rasisme berjumlah 13. Dan 10 diantaranya laki-laki, 3 orang mahasiswi. Kemudian, 30 mahasiswa datang setelah terjadinya ujaran rasisme sebagaimana diketahui ujaran secara verbal seperti "Monyet", nada rasial ini dapat ditunjukkan kepada mahasiswa Papua. Selain mahasiswa, juga seluruh masyarakat Papua merasa menginjak martabat dan harkat sebagai ras melanesia atau secara

umum ras negroid.

Insiden ujaran rasisme yang terjadi 16-17 Agustus yang lalu. Menurut Katharina (2019) dalam insiden tersebut, bermula adanya dugaan pembengkokan tiang Bendera Merah Putih terantuk di bagian parit. Kemudian, muncul tuduhan bahwa bendera merah putih dengan posisi miring tersebut dilakukan oleh mahasiswa Papua di Kalasan III. Hal tersebut, mengundang kemarahan massa. dalam kajian “*singkat terhadap isu faktual dan strategis*” menunjukkan keterlibatan pelaku dalam insiden di Surabaya diantaranya: Ormas berjumlah 700 massa dengan sebutan FKPPi. Hipakad, Pemuda Pancasila, Patriot Garuda, Pagar Jati, dan FPI mendatangi asrama mahasiswa dengan teriakan sampai ujaran rasial berdasarkan laporan warga, pada tanggal 17 Agustus 2019. Disamping itu, pihak pemerintah dari Satpol PP, Aparat Kepolisian, dan Aparat TNI datang ke lokasi melakukan langkah persuasif, namun kehadiran mereka membuat 43 Mahasiswa benar-benar “trauma”, sehingga langkah persuasif tidak berjalan dengan efektif. Sebab itu, ujaran rasisme dari kegagalan proses persuasif Mercer (2020).

Rasisme diskursus politik, *impact* rentetan guncangan dari di Kota Surabaya, isu rasisme ini beredar di Papua dan Papua Barat dengan akselerasi kecanggihan kemajuan teknolog, lalu membangunkan ekspresi masyarakat dibuktikan melalui demonstrasi anti-rasisme. Selain menyampaikan aspirasi, juga ada tindakan-tindakan yang dinilai “anarkis” melumpuhkan fasilitas umum termasuk milik personal (mobil, kios, rumah dll). Sekali lagi, di daerah pun keterlibatan para elit pusat bekerja sama dengan elit lokal untuk menangkapi demonstrasi dan tindakan anarkis. Dalam aksi tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tito Karnavian dan Menkopolkum Wiranto

(melalui You Tube. Dengan BeritaSatu, 09/02/2019). Mereka menuduh ketua umum *United Liberation Movement for West Papuan* (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda, merupakan aktor dan provokasi, disampaikan melalui konten You Tube dengan akun: Metrotvnews (07/09/2019).¹

Diskursus rasisme politik, didukung dengan beberapa studi yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Sugandi (2008) di bidang pertambangan dan pertanian ada pemberlakuan diskriminasi rasial orang Papua diposisikan sebagai inferior dalam aktualisasi Orang Asli Papua (OAP). Studi yang sama dilakukan oleh N. Islam (2012). Dalam kerangka pemikiran Ilmu Komunikasi, pada dasarnya tulisan ini merupakan sepenggal proposisi dari tinjauan Kajian Media dan Minoritas, dengan maksud menggali pesan-pesan etnisitas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Media, khususnya program televisi “Keluarga Minus” di saluran TransTV. Representasi mempunyai dua urgensi yang harus dipahami dalam konsepsi tersebut, yakni representasi mental atau konsep dan representasi bahasa. Sitkom melalui saluran stasiun TransTV, salah satu seorang asli dari Papua bernama Minus berwarna kulit hitam, dalam andegan *shooting*, menjadi sasaran rasial karena kepribadian yang dimilikinya. Pada kesempatan yang lain, studi yang dilakukan Saputra (2017) menurutnya, politik identitas negatif di Menokwari terlalu *Self-determination* memunculkan pertentangan antar etnis, kekerasan, intoleransi, penolakan terhadap yang berbeda, serta rasisme. persolan mendarat ketidakpuasan publik Papua, diantaranya yaitu masalah optimalisasi pelayanan publik, isu pembangunan manusia yang tetap

¹ Mengungkap Provokator Kerusuhan di Papua
(<https://www.youtube.com/watch?v=uGWmiMZ7V8s&dist=TLPQMTYwMzIwMjFAG-BfOWP37g&index=2>)

memperhatikan nilai-nilai budayanya, pembangunan infrastruktur, keadilan politik, isu rasisme, dalam studinya Febrianti et al (2019).

Paralelnya, rasisme terjadi pada 2019 di Kota Surabaya, ada fenomena yang seragam telah kontroversial. dalam hal ini, kontroversial ditimbulkan oleh Ambrocious, berawal dari kritikan Natalis Pigai mengenai realisasi Vaksin Sinovac ke rakyat. Kritikan pada intinya, realisasi Vaksin Sinovac boleh dilakukan akan tetapi akan diterima atau tidak terima bergantung pada Hak Asasi Manusia, kemudian Ambrocious Nababatan tidak terima dengan kritikan tersebut. Akhirnya, Ambrocious melabelkan mantan Komisioner sebagai seekor “Gorila”. Argumentasi pelaku hanya ingin menggunakan “satire” sebagai respon balik dari kritikan mantan Komisioner tersebut. (Tribunnews.com 25/02202).

Fenomena rasisme di Eropa. Beberapa studi seperti studi Foucauldian yang dilakukan oleh Lentin (2004). Ia telah memperlihatkan rasisme di Eropa pada abad-17-20. Bagaimana diskursus rasial terhadap semitisme etnis Yahudi. Uletan rasisme studi yang sama dari Darnell (2007). Menurutnya, dinamisasi rasisme tidak statis, tetapi ulet dan fleksibel. Ada bentuk formasi diskursif penanda perbedaan, yaitu seksualitas, pedagogi, *parenting* (orang tua), domestifikasi, dan perbudakan. Studi serupa dari oleh Macey (2009). Lebih menekankan implementasi kekuasaan, pada sistem politik nazisme terhadap etnis Yahudi.

Rasisme juga melanda di sepak bola, wajah rasisme tidak asing lagi dalam konteks sepak Bola Italia tidak terlepas dari ujaran rasial terhadap para pemain yang bernama Mario Balotelli di suarakan dari suporter seperti “...suara monyet 'buu buu', dicemooh setiap kali mereka menyentuh bola atau menjadi sasaran nyanyian” Doidge (2015). Bahkan Mario Batotelli diberikan “black Monkey”. sebagai

punishment yang diberikan pelarangan untuk tidak hadir terhadap suporter dalam pertandingan. Tidak hanya dilarang untuk datang pada saat pertandingan, tetapi juga memberikan denda terhadap pelaku Rivai (2013). Memahami rasisme dalam ajang permainan sepak bola menjadi senjata tajam untuk meruntuhkan para pemain, sebelum belum menentukan pada mereka yang kalah atau menang. Contoh lain, xenofobia dalam bentuk bendera “poster”, “kaos”, “stiker”, “penggunaan suara monyet” dan “lempar pisang” terhadap pemain kulit hitam seperti pemain terkenal Ronaldinho, Thierry Henry, dan Roberto Carlos. Tentunya, ujaran rasisme ini untuk memotong urat-urat pemain, sehingga main tidak profesional dalam sepak bola (*Fotball*) Llopis-Goig (2009).

Dalam konteks sepak bolah, pemain di Indonesia khusus pemian asal Papua menjadi korban rasisme. seperti boaz Solossa, Titus Bonai Pratick Wanggai. Pemain dari Indonesia timur boaz dan Titus Bonai korban rasisme pada tahun 2019 lalu (Indosport 2019). Sedangkan, Patrick pada tahun 2021 di Makasar dan ia mendapatkan ujaran rasisme oleh sporter persija Jakarta. (Hai.grid.id 2021).

Rasisme di Amerika Serikat (US). Berdasarkan beberapa studi Foucauldian, seperti Mendieta (2004). Mandieta memberitahukan bahwa Amerika serikat memiliki riwayat rasial dalam sejarah, supremasi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam masih kental dalam stigma yang terpolarisasi. Lagi, Studi Foucaudian yang dilakukan oleh Jabri di US bahwa rasisme tidak lagi dipahami sebagai pengolongan spesies berdasarkan ciri-cirinya, tetapi rasisme dipahami sebagai diskursus politik Jabri (2007). Sekali lagi, Rasisme menurut Sahabanahirad bahwa berbagai legitimasi diskursus, seperti yang berdasarkan jenis kelamin, kelas, seksualitas dan ras, ditafsirkan/interpretasi, dan

diabadikan E. Sahabanirad (2017). Bahkam Sonu menampilkan bahwa rasisme juga terjadi bindang pendidikan sangat kentara Sonu (2020). Contoh yang lain legitimasi rasisme, isu rasisme di Minneapolis New York atas kematian G. Floyd mengundang protes ditengah-tengah isu pandemi. Persoalannya, stigma 'kulit hitam' masih dipandang sebagai seorang "pencuri" Mercer (2020:3).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis diskursus Foucauldian. Diskursus/wacan yang mengandung pernyataan (*statement*) Wiradnyana (2018). Pengambilan data melalui media dan wawancara. Dalam pendekatan media massa untuk menganalisis pernyataan-pernyataan subjek yang berotonom. Sedangkan wawancara, menghadirkan 6 subyek korban rasisme di kota Surabaya pada 2019 silam di Asrama Papua, Kamasan III, Jawa Timur. Berbeda dengan pendekatan Fenomenologi masuk pada pemikiran subjek, seperti yang diyakini Husserl bahwa fenomena berada dalam *consciousness* seseorang kepada siapa fenomena tersebut menampilkan diri dalam bentuknya yang asli Asih (2015). Arkeologi keterkaitan dengan sejarah yang cenderung hubungan dengan antropologi Hasrah (2013) filologi melihat dari unsur kebahasaan, studi literatur pada penekanan teknis dan lintas, psikologi lebih condong subjektif dan deskriptif individualis Mujib (2015). Arkeologi Foucault tekad untuk mencari diskursus-diskursus yang diproduksi oleh geneologi/kekuasaan untuk memahami spektrum situasi teristimewa erat kaitan dengan kekuasaan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam perspektif Foucault, jika ada diskursus resmi maka ada diskursus

alternatif lain (*hypomnema*) pengetahuan tersembunyi, selain juga terdapat konter diskursus (*counter discourse*) yang lebih kepada rute intelektual dan meninjau persoalan objektif dari sudut kekuasaan Foucault (1997). Diskursus Foucault penggunaan "bahasa", "Sebagai "modus" dalam praktik kekuasaan.

Konsep dan teori *Power of knowledge* Michel Foucault Perspektif erat kaitan dengan kekuasaan, formasi-formasi diskursus yang membangun strategis dalam relasi kuasa (*relation of power*) Foucault (1972). Foucault nenandang (*kick out*) kekuasaan tidak terletak tunggal absolut, kaum elitis cukongan, dinasti, serta hierarki, bukan pula, monarki atau pun oligarki. Namun baginya kekuasaan tidak terpisahkan dengan relasi kuasa yang horizontal yang berhubungan dengan kekuasaan-pengetahuan.

Dalam hal ini, diskursus/wacana yang diproduksi kekuasaan berhubungan dengan kepentingan kekuasaan. Kerap kali, kekuasaan dominan mendiskursus terhadap mereka yang *powerless/speechless*. Sehingga pihak subordinan cenderung dimarginalkan oleh kekuasaan dominan. Dan kekuatan inferior senantiasa membenteng diri dari diskursus resmi dan terjadinya pergulatan ideology (*struggle ideology*).

Foucault tidak berfokus pada persoalan rasis, paling tidak pernah menyinggung rasisme secara langsung dan eksplisit, tetapi dalam konteks ceramahnya di *Colle`ge de France*, dari tahun akademik 1975–76 Foucault (1975). Diskusi singkat tentang kuliah ini akan memungkinkan kita untuk menghargai cara pendekatan Foucault terhadap rasisme dapat menjadi wawasan dan berguna dalam konteks "Amerika".

Diskursus lain yang perlu dipahami dalam Karya Michel Foucault. Diantaranya yaitu, *The Birth of Clinic* Foucault (2003), *Madness and Civilization* Foucault (1972), Foucault (1972b) di tahun

1969 ia menulis *L'Archéologie du Savoir (the Archeology of Knowledge)* (1972) guna memperdalam domain teoritis karya lampainya serta mendekonstruksi-rekonstruksi pemahaman yang telah dicapai sebelumnya. Memberikan penjelasan erat kaitan dengan judul "*The Order of Things An Archaeology of the Human Sciences*" Foucault (1976). Sanusi (2010) *Historis of Sexuality*, Foucault (1972-1977) *diciplines and punishment* Foucault (2012). Beberapa diskursus tersebut tidak hanya sebatas label, namun ada praktek-praktek yang menjadi pengetahuan berlegitimasi untuk merealisasikan.

Sekilas, melihat dialektika diskursus Foucault, dalam pemikiran Derrida dan Lyotard. Perspektif Derrida (2019) Derrida (2019) misalnya "Dekonstruksi" lebih mendewakan "Fonosentris" yakni "*Game Of Language*". Ia dapat dipahami sebagai membangun makna "Baru" terlepas dari pemaknaan yang "Mapan" pada umumnya (*common*). Jadi, realitas hanya bisa dimengerti melalui "Bahasa", ia mengacualikan "Tulisan". Berbeda dengan Lyotard (1984) dengan "*Grand narrative*" lebih kepada "Fotosentris" yang artinya ia lebih condong ke "Teks". Baginya, realitas yang bisa dipahami melalui teks, yang artinya mengecualikan unsur kebahasaan. Maka, dialektika diskursus Foucault tidak mempersoalkan entah itu "Bahasa" maupun "Teks" ia mendamaikan antara "Teks" maupun "Bahasa/linguistik".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Resmi: Era Kerajaan (EK). Gelpke dalam bukunya "*On The Origin Of The Name Papua*". Secara etimologi, ia mengatakan bahwa nama Papua berasal dari kata "Puah-Puah" dalam bahasa Melayu yang berarti "berambut keriting" Crawford menulis di kata pengantar kamusnya bahwa itu

didasarkan pada salinan William Marsden's *Dictionary* (1812). Pada satu sisi, wilayah bagian timur digambarkan *Frizzled* (keriting) disandingkan dengan orang Afrika (negro), sedangkan halaman 135 menuliskan bahwa Papuwah *frizzled*/kusut, pulau New-Guinea—penghuni pulau itu adalah dari ras negrito (negroid). Penjelasan Crawford masih ambigu dalam pegangan pendefinisian Gelpke (1993)

Diperjelas oleh Mashad (2020) berjudul "Muslim Papua Membangun Harmoni Berdasar Sejarah Agama di Bumi Cendrawasih". Ia menguraikan bahwasannya, Istilah Papua asal-usulnya masih kontroversial. Dalam perspektif sebagian muslim, nama paling valid untuk menyebut bumi cendrawasih adalah tanah "Nuu Waar" (dari kata Nuur) Nuur Waar lebih sesuai karakteristik wilayah yang ditinggalkannya. Kemudian, Ibnu Batuta melahirkan istilah "uryyani" digambarkan orang-orang pada waktu itu tidak memakai pakaian.

Kemudian, situs dan sejarah islam di wilayah ini, termasuk memberika nama baru terhadap wilayah ini di ambil dari beberapa bahasa "Papo Ua" yang berarti tidak bergabung. Adapun, "Pua-pua" artinya keriting. Namun oleh kolonial Portugis nama itu secara substantif dimaknai sebagai "hitam keriting", konotasi negatif seperti "bodoh", "jahat", "suka makan orang" (kanibal) diselaraskan dengan k negro (neger) di Afrika. Kondisi yang lain, adanya praktik kegiatan komoditas dan Praktik "Perbudakan", Papua pada abad ke-15 Masehi, masuk dalam perdagangan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) Mahmud (2014) Bagian yang lain, Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Tidore Masyarakat Papua juga disebut "Janggi" (orang hitam). Namun, masyarakat Papua menolak konsep "Janggi", karena label ini menyiratkan makna negatif B. Anugerah (2019).

Diskursus Resmi: Orde Lama (Orla). Pada orde lama, Pidato Presiden Soekarno menyatakan “...Tanpa Irian Barat, Indonesia belum merdeka”. Lebih mengacuh *statement* “kibarkanlah sang merah putih di Irian Barat”. Kemudian pidato diakhiri dengan pernyataan “Negara Boneka Papua”, “Irian Barat adalah wilayah terbelakang”, “daratannya dipenuhi gunung dan rawa-rawa sulit ditembus”, “primitif menggunakan kapak batu”, “kulit kerang”, “tongkat untuk beraktivitas”. Bahkan, Soekarno berkata “dibandingkan dengan wilayah kepulauan kami, Irian Barat hanya selebar daun kelor, tetapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami”. Serta diakhiri dengan pertanyaan, apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan?”. Dalam catatan Cindy Adams, Soekarno bicara “menyambung lidah rakyat Indonesia”(Tirto.id 2018).

Pada kesempatan yang lain, Sogol membenarkan *statement* Presiden Sukarno bahwa Papua adalah “bagian dari Indonesia” berdasarkan pendekatan mitologi. Dalam pendekatan mitologi, “anjing hitam” melabangkan orang Papua kulit hitam sedangkan “anjing Putih” melambangkan orang orang Indonesia warna putih. Mitologi warna hewan “hitam-putih” menggambarkan hidup orang papua dengan orang Indonesia rukun Pamungkas (2015). Tidak hanya itu, Menurut soekarno bahwa “bangsa Papua pada saat itu masih “primitif” sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan”, Anugerah (2019).

Diskursus Resmi: Rasisme Orde Baru (Orba). Pada Mei 1984, Presiden Soeharto mengumumkan bahwa pada ‘Repelita IV’, ‘Transmigrasi’ memiliki peran yang ‘krusial’. wilayah-wilayah perkotaan jumlah “populasi non-Papua mengungguli orang Papua” dan secara ekonomi, yang pertama “menguasai”Johanes Supriyono (2014) selain Soeharto fokus

pada pembangunan, dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (LIPI). Budi Hernawan menampilkan bagaimana aparat keamanan Indonesia menyikapi “keprimitifan” masyarakat Papua dengan metode “penyiksaan/koersif” serta “menidak-manusia” akan ‘orang Papua’ dan menurunkan derajatnya menjadi sesuatu yang “hina”. Isu tersebut terutama marak beredar pada masa pemerintahan Orde Baru ketika pemerintah menetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Militer Alam (2020). Telah dipertegas dalam tulisannya Sukmawati (2018).

Soeharto mengutus Ali Moertopo dikirim ke Papua untuk dalam hal diplomasi lokal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) (Tirto.id, 2018). Pernyataan yang paling rasis diungkapkan oleh Ali.

“Jika kamu orang Papua ingin merdeka, maka pergilah mengemis kepada Amerika dan meminta salah satu pulau di Pasifik atau pergilah ke bulan dan dirikan negara Papua disana, sebab kami tidak membutuhkan orang Papua, tetapi kami membutuhkan tanah Papua”, (Tirto.id 2018.09/12/2018) (Kompasiana 2016. 05/02/2016)

Instruksi presiden (Inpres) yang dikeluarkan oleh Soeharto untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di “pelosok-pelosok”. Khususnya di Papua “sekolah Inpres” sudah dibangun sekalipun tidak terlepas dari kekurangan fasilitas sekolah—Progress sampai sejauh ini masih berbeda jauh dengan daerah lain. Ada beberapa alasan hingga saat ini, dalam pandangan Budiman di antaranya “keterbatasan sarana dan prasarana”, “faktor geografis dan transportasi”, “jarak tempuh”, “biaya tempuh” “kebutuhan guru”, “minimnya ketersediaan buku”Budiman (2017).

Diskursus Resmi: Era Reformasi (ER). Frans Kaisiepo

mengusulkan istilah “Irian” (Ikut Republik Indonesia Anti *Netherland*). Ketika melakukan operasi Tri Komando Rakyat (Trikorra) “Papua” diganti dengan “Irian Barat”. Kata ‘Irian’ ditolak oleh seluruh rakyat Papua karena dianggap melecehkan dan merendahkan martabat budaya orang Papua secara politik Suryawan (2014). Kemudian, Abdurrahman Wahid “Irian Barat” menjadi “Papua” Sholahuddin (2020).

Untuk mengakar kekuasaan, pemerintah melegitimasi regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kini menjadi dasar pelaksanaan “Otonomi Khusus” Papua ini, ditetapkan oleh DPR RI pada 22 Oktober 2001, kemudian disahkan oleh Presiden Megawati pada 21 November 2001 dan dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 2002 Malak (2012). Menurut menurut Rohim (2015) istilah “Otonomi Khusus ” dalam diartikan sebagai “kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri” sekaligus “mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua” serta “menentukan strategi pembangunan” (sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumberdaya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua).

Lanjut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto. Menggunakan istilah “Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)”. Diskursus ini, mencolok saat peristiwa membunuh belasan pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun Jembatan di Nduga. Istilah tersebut merujuk pada kelompok Egiyus Kogoya, yang merupakan pimpinan Organisasi Papua Merdeka di bagian Wilayah Nduga, (CCN. 18/12 2018).

Status/label penetapan pemerintah untuk “Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)” untuk Memberantas

Aksi KKB “*Stakeholder*” yang diwacanakan oleh Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw (BBC 29/12/2019b). KKB/KKSB berubah menjadi teroris yang diproklamsikan oleh Mahfud MD (CCN 18/12 2018b) bertepatan dengan penembakan Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) bernama TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha (Kaltim.tribunnews 30/04/2021), Menurut anggota Komisi I DPR RI Hasanuddin menilai “Separatis” OPM Papua menjadi KKB menyulurkan kekerasan itu sendiri. Karena ada pengalaman “Trauma” pada Zaman Orde Baru (MediaIndonesia. 3/5 2021). (Cmmindonesia.26/08/2019).

Disamping perputaran sistem demokrasi, rezim Jokowi dikenal dengan istilah seperti penggunaan “politik dinasti” “anti-kritik”, “antek-antek asing” dianalogikan rezim Soeharto “Totaliter” *exstreams* penggunaan “tuduhan makar”. Dalam Tulisan Ben Bland seorang korespondensi senior dari Australia dalam bukunya berjudul “*Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake*” memposisikan Jokowi sebagai “*Man of Contradictions*”, Bland (2020) dimana buku ini bersisi ketidakmampuan seorang kepala Negara sehingga dilabelkan sebagai “walikota”.

Jadi, meninjau kebijakan Jokowi saat ini menggunakan bebera pendekatan slogan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat seperti “Otonomi Khusus”, “Trans-Papua”, “Proyek Pembangunan”, “Militerisasi” “Kujungan”, dan “Pemakaran Baru”. Juga alam bidang pendidikan seperti “Afirmasi” dibiayai dari dana Otsus untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan menyodorkan beberapa slogan seperti “NKRI Harga Mati”, “Pansila Sudah Final”, “Tidak Bisa Diganggu Gugat”, “Papua Bagian dari NKRI. Bahkan mencabut hak-hak rakyat seperti “Pemutusan Jaringan Internet”.

Berhubungan dengan pasca anti-

rasisme. Akibat protes ujaran rasisme pemerintah melakukan penangkapan tujuh tahanan politik (Tapol) atas dasar tuduhan makar sehingga mereka terjebak pada norma hukum yang mengatur tindakan-tindakan Makar (Nasioanl.tempo 06/06/2020). Beberapa penangkapan, Ketua II Badan Legislatif *United Liberation Movement for West Papua*, Buchtar Tabuni divonis 11 bulan (tuntutan 17 tahun); Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay divonis 11 bulan (tuntutan 15 tahun); Ketua KNPB Mimika, Stefanus Itlay divonis 11 bulan (tuntutan 15 tahun); Presiden BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alexander Gobay divonis 10 bulan (tuntutan 10 tahun); Eks Ketua BEM Universitas Cenderawasih (Uncen), Ferry Kombo divonis 10 bulan (tuntutan 5 tahun); Mahasiswa Uncen, Hengky Hilapok divonis 10 bulan (tuntutan 5 tahun); Mahasiswa Uncen, Irwanus Uropmabin divonis 10 bulan (tuntutan 5 tahun). Perbedaan hukuman tersebut dinilai tidak adil.

Masyarakat Elit Papua di Jakarta. Willem Wandik hal ini diuraikan melalui akun: Zelly Ata (You Tube) 12 Februari 2021. Menekankan pada “Otonomi Khusus” mendiskusikan sebagai otonomi khusus versi 21-2001 ini tidak memiliki “Roh”, tidak berjiwa tidak memiliki marwah”, “Diperhatikan Secara Koprehensif” pernyataan ini pada penyalahgunaan “Otonomi Khusus” dan pengakuan pada bahwa “Politik Papua Bagian Integral NKRI”. “Memperhatikan persoalan Papua secara komprehensif”. Digaunkan Papua sebagai ‘berdikari’ dan ‘parsial’. Pernyataan ini juga menjadi jargon mendukung pro integrasi. Yorrys Raweyai terus berbicara terkait persoalan insiden terhadap mahasiswa Papua Surabaya 2019 yang lalu. Yorrys membingkai dengan “Papua kondusif” (Alinea. 24/08 2019). Tidak hanya diucapkan oleh Yorrys.

Wiranto pun menyakan hal yang sama “Papua dan Papua barat kondusif” (Jawapos 2019) juga diikuti oleh Tito Karnavian sama “Papua dan Papua Barat kondusif”, (Cnbcindonesia. 08/19 2019).² Melalui Akun You Tube: detikcom. Alur pembicaraan Yorrys dan Lenis memperlihatkan hal yang sama yaitu “keadilan” “persatuan” “otonomi khusus” “Otonomi Sebagai Solusi”. Penekanan pada persoalan rasisme hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum (Kompas. 20/08 2019). Lenis juga ada dugaan bahwa “yang penting itu tugas intelijen siapa aktor dibelang ini siapa itu semua tugas kepolisian”.

Pengakuan diri sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua dan Staf khusus Presiden. Seringkali dikenal dengan “Kepala Suku Papua” “Presiden Papua”. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan diri demikian tidak dapat legitimasi dari Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan bahwa “Lenis sama sekali tak mewakili “Aspirasi Kepala-Kepala Suku di Papua”. Dia kepala suku apa? Mewakili apa? “Tidak ada”. Selain itu, Majelis Rakyat Papua (MRP), Yunus Wonda mengatakan bahwa “Ada LMA Pak Lenis tapi ada LMA juga yang memang ada dari dulu. Jadi untuk itu tidak bisa kita klaim sebagai “Kepala Suku”. Karena kepala suku punya wilayah (Nasional.tempo. 27/08/2019). Pernyataan Lenis serupa dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yaitu Tito Karnavian. Ia menduga ada pihak asing yang ikut campur seperti. Kita sama-sama tahu dari Tito Karnavian Pernyataan tersebut disampaikan melalui konten You Tube dengan akun: Metrotvnews, (07/09/2019).³ Telah

² Berkaca dari AS, Senator Papua Ingatkan Masyarakat Tak Terpancing Isu Rasisme

(Berkaca dari AS, Senator Papua Ingatkan Masyarakat Tak Terpancing Isu Rasisme)

³ Mengungkap Provokator Kerusuhan di Papua (<https://www.youtube.com/watch?v=uGWmiMZ7V8s&list=TLPQMTYwMzIwMjFAG->

diketahui bahwa Tito Karnavian sebagai dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pada Waktu peristiwa di Nduga Tito juga menangani “KKB” Wiranto juga ‘menduga’ hal serupa. (Tribunnews. 31/08 2019).

Pengajian keterangan yang diberikan oleh pemerintah memiliki kesejajaran. Seperti Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Tokoh Kemerdekaan Papua sekaligus Ketua “*United Liberation Movement For West Papua* (ULMWP)” Benny Wenda ‘memobilisasi diplomatik’ kepada sejumlah negara untuk membantu kemerdekaan Papua. (Suara. 02/09 2019). Wiranto mengonstruksikan masyarakat anti-rasisme sebagai “Menunggangi”, “Kompornin”, “Provokasi”, “kekacauan”. Pernyataan mereka hanya sebatas dugaan tanpa pembuktian, namun mereka membuat kebenaran berdasarkan asumsi belaka.

Pelaku Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua Di Kota Surabaya. Kelompok pertama Aparat Negara dalam video tersebut terus mengucapkan kata-kata “Monyet”. try Susanti Berdasarkan sumber media online, You Tube Channel Platform. Dikatakan “Monyet”, disitulah asal-mulanya muncul istilah “rasisme”, Dewanti (2019)

Dalam penelitian ini. Pelaku dan tersangka yang lain dengan sengaja memproduksi “*Hoax*” “Bohong”, Rasisme” (Monyet), dan “Provokasi”. Lalu diedarkan melalui *Facebook*, *Twitter*, You Tube, dan *Whatsapp*. Maka, timbulnya ujaran rasisme dan dampaknya menyebar luas. Khususnya di Papua dan Papua Barat melakukan aksi demonstrasi dan konfrontasi dengan menolak ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Menurut Kusmiarti menunjukkan sentimen negatif, positif, dan netral berdasarkan berita yang telah ditetaskan di tabelKusmiarti (2020).

Masyarakat Papua: Pro-Integrasi. Tidak semua orang asli Papua Pro-

kemerdekaan, tetapi segelintir orang justru pro-para inggrasi bangsa Papua Ke Indonesia (MediaIndonesia. 07/09 2019). Massa aksi dengan atribut merah putih Masyarakat menamakan diri “Aliansi Masyarakat Peduli Papua” di kantor Gubernur Aliansi ini menggelar aksi damai membawa pesan “Save Papua”, “Cinta Damai” ‘torang (kita orang) samua bersaudara’, karena torang samua ciptaan Tuhan (TribunNews. 06/09 2019). Dalam spanduk mengatakan “Kami Papua Cinta Damai”. dalam aksinya, mereka kompak membawa bendera Indonesia seraya menegaskan bahwa “NKRI harga mati”. Pada Spanduknya memperlihatkan ada tulisan bahwa “Papua Bagian Dari Indonesia” (Tribunnews. 2/09 2019b). Fakta di lapangan, ada beberapa masyarakat Pro-integrasi turun demo, setelah terjadinya demonstrasi anti-rasial di Papua dan Papua Barat. Berikutnya merupakan isi daripada seruannya yang mengatakan bahwa “Saya tidak takut, tidak takut dengan demi merah putih, camkan itu, cankam itu. Tidak usah dengar dorang (mereka) NKRI harga mati, anak negeri yang di muka ini”.

Video tempat kejadian pada video ini diunggah 21 Agustus 2019. Melalui You Tube Channel: *Tribun News Official*. Diperlihatkan dalam videonya, bahwa masyarakat Fakfak di tangannya memegang Bendera Merah Putih. Ketegasan untuk berkoban demi “NKRI harga mati” tanpa takut. Hal, ditunjukkan di depan publik dengan slogan “tidak tersembunyi dibalik layar” saat memberanikan diri dalam aksi tersebut.

Diskursus Alternatif: Rasisme Di Kota Surabaya. Ujaran rasisme secara verbal tepat di Asrama Papua. Ujaran tersebut dipicu adanya pembengkakan bendera merah putih ke arah selokan air. Pada hari terjadi ujaran rasisme bertepatan dengan hari besar kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945 merupakan hari kedaulatan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Pengakuan salah satu korban.

“ketika tiang benderah jatuh patah

karena kecepatan angin tinggi mereka sangka kalau dua orang keluar itu jadi pelakunya, nah dari itu baru SLPP, Ormas, Pemuda Pancasila, Fronta Pmbela Islam dll itu datang untuk menghadiri kita disini padahal waktu itu aparat polisi juga banyak dan mereka juga bisa kasih pisah merekakan orang Ormas-Ormas Reaksioner dan Ormas yang sengaja dibentuk untuk permasalahan ini. Ormas Reaksioner itu dibutuhkan ketika ada masalah mereka datang ketika tidak adalah masalah tenang saja kayak preman-preman itu suruhan dari pihak kepolisian begitu biar nama polisi itu tidak jelek dan nama ORMAS itu yang jelek”.

Kehadiran aparat mulai dari polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satpol PP, Ormas reaksioner yang mengklaim pembela pancila. ujaran kebencian dan bernada rasisme dengan nada teriak dan tindakan fisik. ujaran rasis ini ditunjukkan kepada mahasiswa korban seperti “monyet”, “woe bodoh”, “hahah monyet kamu”, “goblok”, “anjing”, “tahi” “bodok eeh kamu saya tunggu nanti jam 12 malam begitu tentara kalau kamu keluar kamu saya bunuh nanti”. Diserta dengan wacana masyarakat seperti “jancok”, dan dengan jel-jel “usir-usir Papua 3X”. tindakan kekerasan seperti “lempar batu”, “mendandang gerbang”, “siram gas air mata”, “angkut ke mobil secara paksa”.

Mahasiswa korban mengaku bahwa awalnya tidak ingin ada kerusuhan sehingga mereka mencoba merunding terhadap kehadiran aparat. Namun, tindakan aparat ‘keras’ dalam ujaran ‘kebencian’ dan rasisme terhadap mahasiswa korban. Jadi, selama hampir dua malam dan tiga hari mahasiswa berjumlah 13 orang. Diketahui 3 diantaranya perempuan dan 10 adalah laki-laki. Mereka terus dikurung di dalam

Asrama kamasan. Pada hari ketika, datanglah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan membawahi makan dan minuman. Kedatangan LBH pun tidak sinkron dengan pihak aparat.

Korban tidak hanya dari segi ujaran rasisme, tetapi telantarnya proses pendidikan. Karena setelah terjadi rasisme tidak lama kemudian sebagian mahasiswa pulang ke Papua ada yang sudah balik, sebagian besar belum balik. Mereka yang belum balik ada dua alasan, pertama ditembak oleh aparat ketika ada demonstrasi anti-rasisme. kedua, tidak balik, karena alasan “traumatik” dan menjadi aktivis yang dinamakan sebagai “Mahasiswa Eksodus” yang saat ini masih bertahan di Papua sebagai aktivitas dari keterasingan korban rasisme.

Dari beberapa perspektif korban merasa merugikan “Harkat dan Martabat”, “Tidak Hormati Sesama”, “Memberikan Luka Bagi Kami” “Trauma”, “Kami Ciptaan Tuhan”, perlu “Keadilan”, tindakan “Ormas Reaksioner”, menimbulkan “Sakit Hati”. Perbedaan manusia dan hewan sangat berbeda jauh. Apalagi tuduhan diawali dengan dugaan. Sebagai ciptaan Tuhan bisa diperlakukan antar satu dengan yang lain dengan hormat bukan saling meninjak. Jika melanggar norma hukum maka diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Para pelaku “Ormas Reaksioner” mengklaim dirinya profesional dalam menerapkan norma hukum. Faktanya, menegur mereka bahwa mereka bukan profesional dalam menegakkan hukum, justru melanggar hukum itu sendiri. Karenanya tindakan atas dasar dugaan ketika Bendera Merah Putih masuk ke bagian parit.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Data yang diambil dalam penelitian ini, mencermati media massa dan *online*. Dibawah ini berdasarkan diambil dari Group *media online* yaitu akun Facebook Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

dan *Group Exodus Papua* 2019. Banyak pernyataan oleh AMP 31 Agustus 2019 mahasiswa Papua melakukan aksi demo mengakhiri rasisme dan menuntut “Hak Penentuan Nasib Sendiri” bagi bangsa West Papua. Menyebut diri sebagai “Aliansi Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat” (APRPPB).

Pernyataan sikap melalui orasi, AMP. Di antaranya yakni “Keadilan”, “Tolak Otonomi Khusus”, “*Free West Papua/Papua merdeka*”. Dari *Media Online Platform Facebook Group* dan *Exodus Facebook Group*. Atas persoalan yang mereka menyeruhkan seperti; “Hak Penentuan Nasib Sendiri”, “pelanggaran HAM”, “Penolakan Rasisme”, “Rezim Borjuis”, “Imperialisme Global”, “Diskriminasi”, “Intimidasi”, “Hentikan Rasisme”, “Tolak Otsus Jilid II”, “Hukum NKRI Rasis”, “Buka Akses Jurnalisasi Papua”, “Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri”, “Ketidakadilan”, “Stop Pengiriman TNI-Polri”, “Hentikan penjajahan”, “Hentikan Pemalsuan Sejarah”, tidak terima dengan “Tikus-Tikus Tanah”, Gorila”. Secara kesinambungan memiliki wacana-wacana memang sama dari cuplikan realitas.

Penekanan sikap opisisi berupa *statement*, “Tolak Otsus” Jilid II dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua sebagai Solusi Demokratik”. Tuntutan. Ini bagian *hashtag*: Salam erat, “Free West Papua” “Papua Merdeka” “Tolak Otsus Jilid” “West Papua”. Seruan Aksi! Poster:” hentikan rasisme dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua” “kami bukan monyet” “Tolak rasisme dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua” “Tolak Pemekaran”, “keadilan”.

Nyanyian yel-yel yang dinyanyikan saat turun lapangan baik oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) maupun masyarakat Papua. Seringkali

memiliki jargon seperti berikut.

Jargon: “Papua Merdeka, Papua Merdeka”

Indonesia No, Refrendom yes

Papua bukan merah putih, Papua bukan merah Putih

Papua Bintang Kejora, Papua Bintang Kejora

Baru-baru kau bilang merah putih.

Jargon, Papua? Merdeka

Refreedom Yes(Liputan6. 22/08 2019).

Dalam konteks ini, AMP juga memiliki sikap anti terhadap labelisasi KKB/KKB menjadi “Teroris”. AMP juga menolak dengan pernyataan “Militer Indonesia Terorist Papua”.

Masyarakat Papua: Anti-Rasisme Lewat salah satu akun *FaceBook* (FB) ditemukan yang dibagikan oleh berinisial NJA. Yang didiskusikan di *Messenger Group CW. Group* ini khusus untuk membicarakan persoalan yang terjadi di Papua. Bertepatan dengan rasisme yang terjadi di Kota Surabaya. Telah disandingkan dengan korban rasisme pemain sepak bola ini. *Statement* boaz Solossa pernah diungkapkan Pertanyaan “lebih terhormat mana. Menyet cari ilmu di urmha manusia, atau manusia cari makan di rumah monyet”. Untuk mendeskripsikan pernyataan tersebut. Lalu, Titus Bonai mengatakan “*say no to racism*”.

Dari pengguna akun menguraikan beberapa *statement-statement* berikut. *Tag*: “Papua Not Monkey”, “Rasisme lawan”, “Hidup Perlawanan Rasialisme”, “Hidup Exodus2019”. (dari: *Hidup Exodus 2019 Group*). Ada berepa komunitas yang diundang seperti: pertama, Parlemen Nasional West Papua (PNWP), *United Liberation Movement for West Papua* (ULWP), Kepolisian Negara West Papua (KNWP), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Menyebut dirinya diri mereka “Monyet-Monyet seluruh tanah

Papua” “Monyet-Monyet di luar negeri” “Monyet-Monyet pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, para Buapti, Dewan perwakilan Daerah/DPRD, Pegawai Negeri Sipil/PNS, Camat, Desa”. Dalam hal ini, penekanan lebih terhadap “Monyet” dan “DPRD Monyet” “anak-anak Monyet dari pulau Jawa” “bahwa bangsa “Monyet Tidak Bisa Hidup Dengan Manusia” dengan ‘Manusia Melayu’, “Mobilisasi” (aksi mengarah pada anarkis).

Bahkan Gubernur Papua pun menambahkan bahwa keterangan yang diperoleh pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan (mahasiswa korban mengungkapkan dengan pernyataan serupa) Surabaya dari salah satu mahasiswa yang ada di Asrama itu, lanjut Sahura, pada saat kejadian tanggal 16 Agustus 2019, oknum anggota TNI sempat menggedor pintu gerbang Asrama sambil mengucapkan kata-kata “anjing, monyet, babi, binatang” “Kami Bukan Bangsa Monyet Kami manusia”, (SuaraPapua. 18/08/ 2019).

Aksi massa memicu Pembakaran gedung Majelis Rakyat Papua (MRP). Dilanjutkan, massa turun di Enarotali di tiga Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Dogiyai (ccnIndonesia. 26/08 2019). Seluruh kegiatan mogok, baik perkantoran, sekolah, dan pasar, berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan aparat keamanan dengan massa pengunjukrasa, yang menewaskan dua orang pengunjukrasa dan seorang anggota TNI. aktivitas masyarakat di kota itu lumpuh sejak Kamis pagi (BBC. 22/08/ 2019a). Kata Lukas, ini binatang-binatang Monyet, jangan lagi melanjutkan status Otsus di Papua barat, kembalikan kepada rakyat. Rakyat menentukan hari ini Otsus habis, rakyat menentukan hari Otsus habis maka tidak ada solusi lain *Refreedom* di Papua barat. Melalui You Tube Channel dengan akunya: Luis Keroman. Diberi

nama: meriding!! “Otsus Habis Papua Merdeka” “Stop Rasisme”.

Diskursus Tandingan/Wacana Tandingan. Menurut M. Jacky Dosen sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Memiliki perspektif untuk persoalan Papua bahwa persoalan ini ada hubungan dengan “Elit politik lokal” yang memainkan peran untuk kepentingan nepotisme baik di Jakarta maupun di Papua. Dan masalah Papua tidak hanya persoalan nasional, namun persoalan Papua merupakan menjadi “Persolan Internasional”. Papua menjadi “Korban Diskursus”.

Pertanyaan Menurut Rocky Gerung, diantaranya, “Hak Asasi Manusia” “Ketidakadilan” “*New kind of nationalism*” “Jenis Nasionalisme Baru” lalu ditekankan perlunya *Politics of recognition* jika dilihat dari *past Memory* diperlihatkan banyak penderitaan pengalaman yang buruk tentu hal ini tidak dapat diselesaikan dengan penggunaan kekuatan berlebihan.

Menurut Intelektual Salim Said pada intinya memparkan bahwa persolan Papua jalan “Masalah Internasional”. Terbukanya di dunia internasional tentang kekayaan Indonesia mudah sekali orang asing masuk melalui jalur ilegal. Suara electoral Papua itu sangat kecil jika politisi mau meminang, tetapi persoalan Papua bisa keluar Ke Internasional. Seperti di Timur Leste campur tangan pemerintah Australia. “Ketidakadilan”.

ANALISIS PENELITIAN

Peneliti punya keyakinan bahwasannya dalam kekuasaan/*domination* atau negara (*state*) tidak memiliki ideologi yang tunggal/singular, namun pasti memiliki ideologi ganda/jamak/plural, mendominasi dan didominasi dari *power of knowledge* terhadap *powerless/inferior*. Dalam pandangan Foucault mereka yang *powerless* dimarginalkan/diasingkan menjadi kelainan/*otherness*. Tidak kalah juga,

mereka yang subordinasi selalu bergerak untuk memenggal ideologi dominan. Maka negara domain/saran untuk pergulatan ideologi (*struggle ideology*). Secara otomatis, posisi masyarakat “menyokong (*sustain*)”, “Instumen politik/*tool instrument*”, “komoditas politik/*komodity of political*”, “catur Politik”, bahkan bahan “perbudakan politik. Dengan memberikan Utopis atau plasebo bahasa sekarang lebih dikenal dengan PHP (pemberi Harapan Palsu). Dalam bahasanya Foucault *dicourses/diskursus* yang aksentuasinya yang menggiurkan oleh agen penutur.

Dalam analisis ini tidak hanya fokus perspektif Michel Foucault, *power of knowledge* dalam diskursus/wacana, tetapi juga menggunakan beberapa perspektif seperti Althusser tentang Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara—perspektif Pasca Marxian Gramsci tentang hegemoni—Foucauldian berhubungan dengan pandangan pasca kolonial. Beberapa pandangan ini dikombinasikan kepentingan untuk menelaah diskursus rasisme dan ras itu sendiri sesuai pandangan Foucault tentang arkeologi dan geneologi Sihombing (2016)

Diskursus Rasisme Hubungan dengan Ras. Konsep rasial pada esensinya tidak memiliki bias, sesungguhnya ras itu sendiri sebagai epistemologi murni. Namun berhubungan dengan kekuasaan, maka praktisasi pihak kekuasaan yang mendominasi ras lain, kemudian isu ras menjadi diskursus politik Mendieta (2004).

Persoalan ras secara umum, dikategorikan dengan istilah “Negroid”, “Mongloid” dan “Kaukasoid”. Pertama ras, teori evolusi yang pertama kali dipaparkan oleh ahli dalam ilmu biologi yaitu Charles Darwin pada tahun 1858. Ras di dunia ini hanya ada 4 ras seperti Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid, Mongoloid, Sihombing (2016). Menurut Kroeber, penggolongan manusia Berdasarkan ras dapat dibedakan menjadi 3.(1) kaukasoid

pertama, Nordic (Eropa Utara sekitar Laut Baltik).

Dalam dunia tontonan dengan film berjudul “*film Eye In the Sky*”. Dengan genre film drama-thriller arahan Gavin Hood memperlihatkan bagaimana “Ras Kaukasoid” lebih superior dalam aspek kehidupan bermasyarakat dibandingkan “Ras Negroid” yang digambarkan jauh tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi, teknologi dan taraf hidup, Sumanti, Aritonang, e Wijayanti (2018).

Titik keprihatinan dalam pembahasan ras itu sendiri menjadi problematika. Dalam membentangkan klasifikasi ras menjadi arena rentang untuk rawan diskursus rasisme atau diskriminasi rasial dalam nuansa politik yang satu dengan yang lain saling menentang berdasarkan pengelompokan ini. Maka, munculan bangsa dan negara berdasarkan ras, pada nuansa positif ras tidak hanya batas pada epistemeologi secara biologis. Tetapi menjadi politisasi kekuasaan dominan dalam mempertahankan mereka menguasai dan dikuasai antara yang suprastruktur dan inferior.

Diskursus Rasisme Resmi. Dalam Karyanya Foucault “*The Order of Thing: An archaeology of the human sciences*” (1966). Ia menunjukkan pengetahuan lahir diskontinuitas/kesinambungan berdasarkan kontekstual yang disebut sebagai “Diskursus”. Sehubungan dengan ini, diskursus dapat dipahami sebagai strategi kekuasaan, formasi kekuasaan, diskursus normatif, legalitas pengetahuan, cuplikan realitas, representasi sosial, konstruksi peristiwa tertentu. Semua hal ini berkaitan dengan relasi kuasa dalam mendefinisikan suatu keadaan tertentu, sekaligus memproduksi pengetahuan sebagai kebenaran yang menjadi pendoman dan kontenplasi subjek untuk diaplikasikan secara praktikal.

Willayah bagian Indonesia timur,

zaman kerajaan masih masih tertutup terhadap penamaan daerah. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (*Nederlands Nieuw- Guinea atau Dutch New Guinea*) Kholill (2016). Dari catatan Antropolog, Papua dikenal sebagai “Papoea” digunakan untuk belanda, kemudian 2001 diganti dengan Papua oleh Indonesia Ploeg (2002) Ploeg (2002). Melihat pemandangan disebut sebagai “*New Island*”, “*Greenland*” bagian dari kepulauan pasifik. nama daerahnya disebut sebagai Papua Nugini (*New Guinea*) menamai Papua disertai dengan pemaknaan rasis. Seperti Pelaut Spanyol Ynigo Ortiz De Retes (abad 14) pendefinisian wilayah bagian Timur: “*Puah-puah*”, “*Pua-pua*”, “*Pua-Ua*”(divergen), (*frizzled*) diparalelkan dengan kusut. Lebih mengherankan lagi, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) Perbudakan (praktik perdagangan perbudakan menjadi komoditas jual-beli orang Papua), sampai kepada istilah “kanibalisme”. Sementara, era Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Tidore (abad-20) Janggi (artinya kulit hitam, orang Papua sendiri menolak konsep Janggi karena dianggap merendahkan martabat).

Papua dibawah rezim kerajaan Islam, Kesultanan Tidore di Maluku, tidak ada sistem penindasan (*oppression*), okupasi/imperialisme, praktik kolonisasi terhadap Papua atau saat itu disebutkan Papua sebagai “*Nuur Waar*”. Terkecuali sistem barter, Tidore meminta Bantuan salah satu orang yang digambarkan sebagai kuat bernama Gurabesi dari Raya Ampat berkerja sama dengan Tidore Mahmud (2014).

Kerukunan Tidore dengan masyarakat Papua berakhir dengan tragis,, ketika masuknya, Spanyol, Portugis, serta Belanda. Sejak itu, Papua dilihat sebagai Kepulauan baru (*new island*) dan untuk menggambarkan Masyarakat lokal (*local society*) sebagai “*Papo Ua*” “*Pua-pua* artinya

“*frizzled*/kusut” “keriting”. Terlebih, kolonial portugis nama itu secara substantif dimaknai sebagai “hitam keriting”, konotasi negatif seperti “bodoh”, “jahat”, “suka makan orang” (kanibal) disamakan dengan konotasi negro (neger) di Afrika. Lagi-lagi, adanya praktik kegiatan komoditas dan Praktik “Perbudakan”, Papua pada abad ke-15 Masehi di era VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) Mahmud (2014).

Diskursus-diskursus diatas berhubungan dengan kekuasaan-pengetahuan baik dari orang barua maupun orang Indonesia untuk pemberian nama “Wilayah Bagian Timur”. Sementara, diskursus lain masih digunakan saat ini secara rasial seperti “hitam keriting”, “bodoh”, “jahat”, “Kanibal”. Secara ras dikatakan “negro” daerah dahulu tempat komoditas sekarang menjadi “saran kapitalisme global”. Diskursus ini yang sering dialami oleh orang-orang Papua dalam konteks masyarakat kontemporer.

Tidak hanya itu, berdirinya “Nasionalisme Papua”, sebab secara ras (Kaukaosid) Belanda memutuskan Papua tidak terintegrasi (*not integrated*) dengan kepulauan Nusantara atau kerajaan Islam khususnya Kesultanan Tidore. Disinilah ritmenya, bangunan episteme diskursus rasisme dari “Barat” yang melakukan stigmatisasi/poralisasi melalui praktisasi terhadap diskursus rasisme.

Lebih lanjut, beralih ke peralihan Orde Lama (Orla) Soekarno (1945-1967). Memiliki diskursus kurang lebih serupa di era Kerajaan. Diskursus rasisme terhadap orang Papua (*Papuan People*). Lebih jauh, diskursus Soekarno untuk mengajak menguasai Papua seperti “*Irian barat adalah wilayah terbelakang*”, “*Irian barat adalah adan bagian dari tubuh kami*”, “*tidak membiarkan anggota tubuh diamputasi*” “*daratangnya dipenuhi gunung dan rawa-rawa*”, “*sulit ditembus*”. Lalu, diskursus rasis seperti

“Primitif” “Menggunakan kapak batu” “Kulit kerang”, “Tongkat untuk beraktivitas” “Anjing hitam”, “Uryyani”.

Dalam hal ini, Soekarno memiliki kekuatan untuk menumpas kedudukan Belanda di Papua serta ideologi “Nasionalisme Papua” atau kini dikenal dengan “*West Papuan/Papua Barat*”, ditambah dengan simbol negara yaitu bendera “Bintang Kejora”. Untuk menumpas ini, memunculkan dengan gerakan Operasi Rakyat (Tri Komando Rakyat). Kemudian, Belanda melakukan Kongres dinamakan dengan *New York Agreement* dengan sistem “Sutu Orang Satu Suara (*One Vote One Man*), lalu dengan adanya agenda “*Integrasi Pasca-New York Agreement 1962*” dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) sampai 1969. Dalam Kongres tersebut, dinyatakan Rakyat Papua ingin bergabung dengan Indonesia Yambeyapdi (2018).

Pada satu sisi, Yambeyapdi menelanjangi, lahirnya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan *New York Agreement* dan PEPERA yang menyebabkan tumbuhnya kelompok “pro-integrasi” dan “anti-integrasi”. Argumentasi kelompok anti-integrasi bahwa proses PEPERA tidak sesuai sistem “*One Vote One Man*”, namun dengan pendekatan dominasi “Militerisasi sehingga pemilihan masyarakat karena takut bukan berdasarkan hati nurani. Sebagai justifikasi, diskursus rasisme secara kontinuitas mulai berputar bagaikan mesin.

Transisi kekuasaan Soekarno beserta dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto (1921-2008). Soeharto memiliki formasi diskursus rasisme terhadap masyarakat Papua seperti “Populasi Non-Papua Mengungguli Orang Papua” “Keprimitifan” “Orang Papua Hina”. Selain itu, Ali Mortopo, seorang utusan Soeharto mendiskusikan masyarakat Papua seperti “Jika kamu orang Papua ingin merdeka, maka pergilah mengemis kepada Amerika dan meminta salah satu pulau di

Pasifik atau pergilah ke bulan dan dirikan negara Papua disana, sebab kami tidak membutuhkan orang Papua, tetapi kami membutuhkan tanah Papua” (Kompasiana. 03/022016).

Kebijakan lain, mengenai sekolah Instruksi Presiden (Inpres). Mengutamakan “Daerah-Daerah” yang diyakini “Polosok-Polosok”, satu satunya ialah daerah Papua. Walaupun niat baik sekolah Inpres sebagai pembangunan, tidak dapat didukung dengan fakta kekacauan (*chaos*) Pembangunan Infrastruktur masih porak-poranda. Ada beberapa alasan menurut Budiman diantaranya, “keterbatasan sarana dan prasarana”, “faktor geografis dan transportasi”, “jarak tempuh”, “biaya tempuh” “kebutuhan guru”, “minimnya ketersediaan buku”, Budiman (2017). Diskursus rasisme masih diskontinuitas berdasarkan rasialisasi kuasa dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. berbeda pula, kebijakan dan formasi diskursus masih dilekatkan pada kondisi orang Papua.

Diskursus rasisme di tabel di atas sangat berbeda dari *The Order Of Things: archaeology and genealogy*. Kekuasaan/geneologi memproduksi pengetahuan/arkheologi sangat berbeda. diskursus rasisme terhadap masyarakat Papua masih kental, hanya saja wujudnya distingsi/berbeda, namun diskursus/wacana rasisme hanya untuk marginalisasi/mengingkarkan orang Papua itu sendiri dengan diskursus dominan bahasa.

Tabel 1.1 Berdasarkan perspektif Michel Foucault menelaah dari *episteme* yang melihat suatu persoalan secara diskontinuitas, berhubungan dengan konteks, tempat (*space*), waktu (*timing*), dan momentum yang tepat.

1.1 Tabel. Diskursus Resmi: Era Reformasi

No	Era Reformasi Episteme (Geneologi)	Diskontinuitas Diskursus Rasisme (Arkeologi)
1	Megawati Soekarnoputri (2001-2004)	Otonomi Khusus Kebebasan Rakyat Papua untuk Mengatur Dirinya Sendiri Menentukan Strategi Pembangunan
2	Era Reformasi Dusdur/Abdurrahman Wahid (1999-2001)	Irian Barat ganti Papua Bintang kejora sebagai Identitas Tidak lebih tinggi dari Merah Putih
3	Jokowi Dodo	Tran-Papua Pembangunan Militeristik Kujungan
4	Kapolda Papua Irjen Paulus	Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Untuk memberantas aksi KKB Stakeholder (Pemangku kepentingan)
5	Wiranto	Provokasi Kekacauan Kompori
6	Luhut Panjaitan	Ya kalau orang Papua enggak (tidak) ada gejolak, bukan orang Papua namanya
7	dakwaan Hengky Hilapok. Ahli dari Universitas Gadjah Mada, Aprinus	Makar (<i>aanslaq</i>) makar sebagai ideologi yang setara dengan Marxisme
8	Kepala divisi humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono	Murni Kriminal
9	Pemerintah Pusat Terkait dengan Isu Rasisme	Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/teroris Pembangunan(<i>Building</i>) Pembangunan
10	Yorrys Raweyai	Papua Kondusif Keadilan Persatuan
11	William Wandik	Otonomi Khusus Diperhatikan Secara Komprehensif Papua Bagian Dari Integral

		NKRI
12	Lenis kogoya	Keadilan (<i>Jusitce</i>) Persatuan (<i>Unity</i>) Otonomi Sebagai Solusi
13	Masyarakat Pro-Integrasi	Satu-Kesatuan Cinta Damai Papua B Satu-Kesatuan Cinta Damai (<i>Love of Peace</i>) Papua Bagian Dari Indonesia

Kekuasaan dalam perspektif Foucault tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan yang monarki absolut, piramida yang hierarki tidak dapat digoyangkan, mutlak terletak pada otoritas yang lebih tinggi. Namun, lebih kepada relasi kuasa (*relation or power*) dan pengetahuan.

Membedah Persoalan diskursus resmi dalam perspektif Althusse dalam karnya (Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara". Aparatus yang paling kasat mata adalah aparatus represif negara, yakni seluruh mekanisme koersif yang bekerja dalam memastikan tereproduksi syarat-syarat produksi. Ada dua jalan menjalankan kekuasaan, pertama adalah pemerintah, pengadilan, penjara, angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Kedua, agama, pendidikan, keluarga, kebudayaan dan seterusnya Althusser (2015).

Dari semuanya itu, Upaya untuk mereduksi berbagai persoalan, rezim Soekarno menggunakan pendekatan kekuatan "koersif", yaitu pendekatan militerisasi. Orde lama munculnya berbagai persoalan pemberontakan dengan ideologi masing-masing. Banyak pemberontakan seperti G30S/PKI (Parti Komunis Indonesia) 30 Setember 1965, Peramesta (Perjuangan Rakyat Semesta) 2 Maret 1977, PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) 15 Februari 1958, PKI 18 September 1958 di Madiun, DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, 7 Agustus 1959, Gam (Gerakan Aceh Merdeka) 6 Desember 1976, OPM (Organisasi Papua

Merdeka) 1965, dan RSM (Republik Maluku Utara). Semua pemberotakan (*rebellion*) atas dasar “ketidakpusaan”, “Ketidakadilan”.

Melirik ke Orde Baru, menjalankan roda kekuasaan bersifat dwifungsi, Antara Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) didukung dengan partai politik Golongan Karya (Golkar) dan pemerintahan tidak murni dalam sirkulasi sistem liberal demokrasi Orde baru secara gamblang orde baru dapat digaungkan sebagai “Nasional Ortodoks” “Nasionalisme Materialistik” serta memiliki legitimasi “pembangunan”, “stabilitas politik”, “persatuan dan kesatuan”, dalam pandangan Jacky (2014). Selera kekuasaan dalam kebijakan pembangunan “sentralistik” disamping mendominasi kekuatan militeristik.

Di sisi gelap orde lama, sangat terasa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) bahkan para pejabat dinamis gonto-gontokan kabinet. Sistem politik dan ekonomi tidak stabil, bahkan ketidakstabilan politik belum ada dinamis sebagai bangsa yang “mandiri” sejauh ini masih dikuasai korporasi asing dalam hal ini “kapitalisme. beralih merambat ke orde baru, Soeharto juga berupa memangkas tindakan-tindakan KKN dan mengerut tindakan-tindakan oposisionis terminologi populer ialah “gerakan dibawah tanah”. Hal itu sendiri membuktikan kepemimpinan ‘otorites’ mengesampingkan sistem demokrasi, bahkan menaklukkan para intelektual menjadi “budak” atau “klien” untuk melayani kepentingan rezim orde baru. Dengan kultur latar belakang yang begitu kompleks dan rumit, sampai sekarang negara Indonesia memiliki tradisi “korupsi”.

Terlepas dari berbagai gerakan oposisionis, lebih fokus pada Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada tahun 1965. Kelompok ini merupakan oposisi yang tidak terima dengan adanya mekanisme

Papua integrasi dengan Indonesia. Di satu sisi, aktivitas Belanda yang mendirikan “Negara West Papua”. Hal tersebut, tersebut kembali direspon oleh Indonesia dengan melancarkan operasi Tri Komando Rakyat (Trikorra). Paralelnya, Belanda dikalahkan oleh Jepang, akhirnya menerima kekalahan, sebaliknya juga Jepang dikalahkan oleh Amerika ketika menggunakan “Bom Atom” di Irosima Nagasaki. Lalu Belanda dan Jepang mengakui kedaulatan Indonesia dan mulai meninggalkan Indonesia.

Pada kesempatan yang lain, pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia, bukan berarti sekalian menghapuskan jejak-jejak dan bekas jejahannya. Secara simbolik bendera “Bintang Kejora” masih hidup hingga sampai hari ini. “Bintang Kejora” diiringi dengan gerakan “Organisasi Papua Merdeka”. Runtuhnya “Orde Lama” dimulai dengan “Orde Baru”.

Luka lama tidak sempat sembuh dan rasa sakit masih terukir dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Ideologi “Nasionalisme Papua” masih kental, ada memory lama kembali marak pada 2019 terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Dimana, muncul diskursus rasisme ujaran “Monyet” dilatarbelakangi atas dugaan pembekokan benderah merah putih ke arah selokkan air, yang dilakukan oleh AMP. Pelaku sendiri memiliki pengetahuan terhadap AMP bahwa gerakan mereka juga bagian representasi “Nasionalisme Papua” gerakan untuk separatis dibawah sistem kepemimpinan Indonesia Try Susanti serta kawan-kawannya seperti Andria Adiansah, Serdah Unang Rohana, Syamsul Arifin, Narsul dan Irwan mereka yang memprovokasi. Biar bagaimanapun pelaku utama ialah Try Susanti atas dasar koordinator lapangan pada hari peristiwa, atas provokasi tersebut merespon dengan cepat oleh berbagai pihak

Ormas.

Dalam kajian “*singkat terhadap isu faktual dan strategis*” menunjukkan keterlibatan Ormas berjumlah 700 massa dengan sebutan FKPP (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI). Hipakad, Pemuda Pancasila, Patriot Garuda, dan FPI. Lalu sikap mahasiswa tidak merespon dengan baik ketika pemerintah berupaya dengan cara negosiasi, Katharina (2019). Termasuk Aparatus Sipil Negara (PSN) seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pihak kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bahkan Militer. Jadi, berdasarkan tindakan-tindakan represif di lapangan negara ini tidak berubah dalam menghadapi persoalan, selalu menggunakan kekuatan represif tanpa harus memenangkan pendekatan persuasif dan proposional.

Tidak hanya itu, kekuatan koersif telah menimbulkan ada penangkapan-penangkapan terhadap para demonstrasi anti-rasisme di Papua. Hal itu merupakan cara negara untuk menghadapi persoalan di lapangan dengan kekuatan kekerasan.

Pandangan pasca-kolonial, dalam Konsep Orientalisme/Other Edward W Said (2003) Groeveboer (1999). Sejalan dengan pandangan Said, fakta sejarah menunjukkan bahwa negara-negara barat/kaum kaukasoid masuk ke asia antara lain: Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris dan Prancis. Kerap kali disebut sebagai “orang barat” / “orang asing”. Dalam hal ini, teristimewa di kepulauan nusantara, kedatangan “barat” untuk monopoli komoditas mencari rempah-rempah yang merambat ke kepulauan Maluku dan Papua. Dengan adanya asosiasi dagang belang VOC Orang Papua, juga orang nusantara juga melegalkan “perdagangan perbudakan” jual-beli manusia. Kepulauan Papua dikuasai oleh Belanda dan misionaris (mereka yang memperkenalkan Injil/Bible) menguasai Papua. Di kepulauan pasisir dibawah

Kesultanan Tidore, B. Anugerah (2019). Pelaut Spanyol Ynigo Ortiz De Retes Papua sebagai “tempat komoditas” “perbudakan” “monopoli rempah-rempah” serta pribumisasi proletar/perkerja.

Terjadinya, kolonialisasi orientalisme tidak hanya “Barat” dan “Timur” khususnya di Indonesia. Tetapi Orientalisme di Indonesia juga terjadi, dengan terminologi paralel “Barat” (Barat dalam pengertian kepulauan Jawa bukan negara barat), dan “Timur” (Timur dalam pengertian bagian Indonesia timur seperti wilayah Kupang, Sulawesi, Maluku, hingga Papua). Orientalisme “Barat” senantiasa digambarkan dirinya sebagai “Peradaban yang mapan”, “Pembangunan sentralistik”, “pendidikan dijamin”, “masyarakat modern”, “rasional”. sementara Papua digambarkan sebagai “kelainan” (Otherness), diistilahkan sebagai “tempat eksploitasi” “ketinggalan zaman”, “primitif”, “ketinggalan pendidikan”, “Irasional”, “ketinggalan pembangunan”, “masyarakat tidak memakai baju tapi pakai Koteka”, “kulit hitam”, “bau tidak sedap” “telanjang”, “kulit kerang” “arena pertempuran”, “medan kenaikan jabatan”, “orang pemabuk”, “keras”, “janggi”. “batu digunakan untuk kapak”. “tempat penelitian” “goblok”, “KKS/KKB/Teroris” (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata/kelompok Kriminal Bersenjata) bahkan “asuh/anjing”, “tahi”, “goblok” “jancok”, “bodoh”, “Gorila” termasuk “Monyet”. Hal serupa dalam pandangan Jacky (2014). Discorsi politik rakyat selalu dicurigai dan diwacanakan “bodoh”, “anti-demokrasi”, “memberontak”, “makar”, “anarki”, “liar”, “separatis”, “provokator”, “komunis”, “fundamentalis”, “Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)”, “sipil bersenjata”.

Pola-Pola Hegemoni dan Resistensi Foulcher dalam pandangan Foulcher terkait dengan pola hegemoni dan

resistensi Foulcher dan Day (2002). Sebetulnya memperkenalkan “kebudayaan Nasional”, erat kaitan dengan mendefinisikan “Ke-Indonesia-an” merupakan formulasi kebudayaan ideologi terhadap budaya untuk memperkuat identitas simultan ada ketegangan dengan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, penguasa memposisikan diri yang paling “berkuasa” sehingga restorasi dan dekoratif untuk mengaunkan kedaulatan negara sangat kontraktif. Foulcher menampilkan bahwa negara berupaya mengurangi “efek negatif” dalam restorasi dan mengkonstruksi apa yang digaunkan “pahlawan nasioanal” atau “hari memperingati” sulit distingsi antara mitologi atau originalitas yang dilekatkannya. Sementara, resistensi dan ketegangan menjadi pembanding hegemoni kekuasaan. Itulah kenapa simplikasi B. Anderson dalam bukunya *“Imagined Communities Reflectioan on the Origin and Spread od Nationlism”*, Anderson (2019). Dimana masyarakat digambarkan sebagai komunitas sebab masyarakat hidup dalam bangsa secara ideal tidak nyata, tetapi sebuah imajinasi.

Sisi gelap (*darkness*), dari Identitas Nasional ialah tidak punya *capablity* kontrol budaya arus globalisasi bagaikan malayu kereta. Tidak heran, masyarakat dipengaruhi budaya negara luar seperti *behavior* “Konsumtif”, Individuslis”, “Hendonisme”, mungkin sekarang lebih ke Budaya Pop Korea Selatan dan Westernisasi/kebarat-baratan. Dengan demikian, membobol kebudayaan nasional.

Bangunan keyakinan ideologi untuk mengkokohkan pada Orla, Orba, dan Reformasi berbeda. Pada orde lama misalnya. Pasca kemerdekaan, pemerintah Soekanro meyakini bahwa suara pemerintah seakan-akan perwakilan rakyat (isitlah populer menyambung lidah rakyat) untuk mendapat legitimasi pasca kemerdekaan pemerintah seokarno dilambangkan sebagai

“Bapak Revulasioner”, “sang Proklamator”, serta dilabelkan sebagai “Pahlawan nasional”, tidak hanya Soekarno, juga beberapa orang yang dianggap pahlawan nasional saat ini. Dengan pangkal atas ideologi “Marhaenism” modifikasi pengan dari pemikiran Marxian Engels (2007)

Beralih ke orde baru, Soeharto memiliki memberikan keyakinan/*ideology* untuk akuisisi legitimasi melalui diskursus “Pembangunan”, “stabilitas politik”, “kesatuan-persatuan”, bahkan pemerintah berorientasi pada “Nasionalisme Materialistik”, untuk kepentingan Papua dia memiliki program mengenai sekolah Impres (Instuksi Presiden) untuk pembangunan pendidikan di daerah pinggiran Jacky (2014) Era reformasi, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga memiliki taraf keyakinan ideologi seperti “kebangsaan”, “keadilan”, “Pluralisme dan Toleransi” sehingga untuk kepentingan Papua Gusdur memiliki peran besar hal mengembalikan identitas orang Papua seperti mengembalikan “Irian Barat” menjadi “Papua” dan menaikkan benderah “Bintang kejora” sebagai “simbok kebudayaan”, dalam hal ini Gusdur tidak ingin benderah Bintang Kejora sebagai “keyakinan” tetapi lebih kepada simbol kebudayaan. Termasuk Megawati Soekaronputri memiliki ideology/keyakinan seperti “Nasionalisme Indonesia”, “Kerakyatan”, “*Rule OF law*” untuk pentingan Papua Megawati memberikan Otsus pada tahun 2001.

Rezim Jokowi juga memili warisan oligarki kekuasaan hamper serupa dengan Orba ideologi/keyakinan untuk Papua “Soeharto kedua”, pembangunan dari “Pinggiran” seperti “Trans-Papua” Pemakaran Baru”, “Militerisitik”, “Pembangunan Materialisitik”, ulasan dalam karnaya M. Jacky (2014), Yakni buku tentang “Nasionalisme Materialistik”.

Dalam hal ini, placebo pemerintah status ditempelkan pada Frans

Kaisiepo sebagai “Pahlawan Nasional” dan membuat uang Rp 10.000 (sepuluh ribu). hal menghebohkan gambar Kaisiepo di uang 10.000 menjadi sasaran bahan olok-olokan. selain itu, ada “Jembatan Youfeta” dan Jembatan ini sebagai “ikon” yang dibungkus rupiah yang Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dalam rupiah tersebut juga terdapat gambar “pluralitas” bagian dari pecahan “bineka tunggal ika”. Tidak hanya itu mencari legitimasi, ada pula melalui pembangunan “Stadion Papua Bangkit”.

Dalam konteks ini, istilah “Materialistik” ideologi yang diperkenalkan oleh Karl Marx yang memiliki keyakinan bahwa “materi menentukan ide”, bukan “ide menentukan materi”, terminologi yang dikenal sebagai “Materialistik”, bukan seperti Hegel “Ide Menentukan Materi” yang disebut dengan gagasan “Gagasan Idealistik”. Sehingga negara mencari legitimasi dengan pembangunan berwatak “materialitis”.

Dalam hal ini, untuk menguat identitas nasional dengan membangun mitos-mitos seperti “Otonomi Khusus”, “Trans-Papua”, “Proyek Pembangunan”, “Militerisasi” “Kujungan”, dan “Pemakaran Baru”. Juga alam bidang pendidikan seperti “Afirmasi” dibiayai dari pemerintah dari dana Otsus untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan menyodorkan beberapa slogan seperti “NKRI Harga Mati”, “Pansila Sudah Final”, “Tidak Bisa Diganggu Gugat”, “Papua Bagian dari NKRI. Bahkan mencabut hak-hak rakyat seperti “Pemutusan Jaringan Internet”.

Dalam rangka ini. semua upaya daripada pemerintah pusat hanya untuk menekankan berbagai persoalan yang ada di Papua. Pemerintah membuat keyakinan dan tawaran seolah-olah menghakiri akan persoalan. Selain itu, kelompok yang dianggap oposisionis sebagai

“KKSB/KKB/Teroris” dan “Separatis”,. Dalam bahasanya Wiranto “Kompoti”, “Provokasi”, “Kekacauan”. Namun sebenarnya, mereka adalah resistensi dalam melakukan subversi terhadap pemerintah, terutama Organisasi Papua Merdeka (OPM), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), serta *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Pendek kata, mereka menolak dominasi Jakarta dan ingin keluar dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini pola resisten untuk terus pertarungan ideologi (*struggle ideology*) dari kelompok resistensi kedaerahaan.

Dalam diskursus rasisme terhadap mahasiswa papua di Kota Surabaya, akuisisi resistensi bahwa mereka menolak pemerintah dengan resistensi seperti “siapapun datang kami tolak” kedatangan pemerintah ditolak mentah-mentah tawar-menawar. Mereka juga meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe, jikalau ingin masuk ke Asrama maka harus “melepaskan lambang garuda”. Lukas pun, tidak meresponi permintaan mahasiswa korban. Tidak hanya Lukas, pemerintah pusat seperti Natalis Pigai sebagai mantan Komisioner HAM, Willian Wandik dan Fadli zon mereka dua sebagai DPR-RI, Lenius Kogoya sebagai staf Presiden. Termasuk pemerintah daerah satu rombongan dengan Lukas, Timotius Murid serta kawan-kawannya ditolak dalam peristiwa tersebut. Ketika oknum politik melakukan ujaran rasisme “Monyet” dan Salah satu mahasiswa satu mengatakan kepada oknum TNI itu bahwa “kami bukan monyet, kamulah monyet karena monyet hanya ada di dalam pikiranmu”. Seluruh mahasiswa pun ingin melakukan negosiasi dengan pihak aparaturnya yang terlibat saat itu, tetapi dengan menggunakan kekuatan koersif mereka lebih kejam ketimbang pendekatan persuasif.

Diskursus

Alternatif

(Hypomnema). Diskursus alternatif lain merupakan oposisionis terhadap diskursus resmi. Ketika kekuasaan memproduksi diskursus resmi yang penuh dengan tipu muslihat, mitos akumulasi realitas, serta medistorsi masyarakat dalam hal didominasi.

Dari sisi lain, sikap oposisionis yang memproduksi diskursus alternatif lain mencoba membendung, menendang, membelokkan, bahkan melawan terhadap diskursus resmi. Tabel 3 berikut ini merupakan diskursus alternatif lain dalam konteks pasca rasisme terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya.

Episteme pernyataan sering diorasi maupun ekspresikan. Penekanan serupa, “Tolak Otsus”, “tolak Otsus Jilid II”, “berikan hak menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua sebagai Solusi Demokratik”. Tuntutan. Ini bagian *hashtag*: Salam erat, “Free West Papua”, “Papua Merdeka”, “West Papua”. Seruan aksi toster “hentikan rasisme dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua” “kami bukan monyet”, “tolak rasisme dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua”, “tolak Pemekaran”, “keadilan”, dan “demokrasi bagi rayaky-bangsa”. “Anti-Rasisme”, “Lawan Rasisme”, “Papua Merdeka”, “Hukum Indonesia Rasis”, “Musuh Kita Rasialisme”, “Hentikan Penangkapan Terhadap Anti-Rasisme”. ada pula, pernyataan tersebut dari mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa, dan Masyarakat Papua (IMMAPA BALI) menyatakan “Stop Rasisme”, “Tegakkan Keadilan”, (Liputan6. 22/08/ 2019). Bahkan menolak pernyataan dengan “gonosida”, “penjajah dan fasis”, “penindasan”, “intimidasi”.

Oposisionis dari *Statement* boaz Solossa pernah diungkapkan Pertanyaan “lebih terhormat mana. Menyet cari ilmu di urmha manusia, atau manusia cari makan di rumah monyet”. Dan Titus Bonai

mengatakan “*say no to racism*”. Ini merupakan membangun benteng. Dibawah tabel 1. 2 ini inti dari diskursus alternatif lain dari subjek.

1.2 Tabel. Diskursus Alternatif Lain (Hypomnema)

No	Diskursus	Alternatif lain
1	Perspektif korban Rasisme di Kota Surabaya	Kami Ciptaan Tuhan Bukan Monyet (<i>We Are Not a Monkey</i>) Keadilan (<i>Justice</i>) Ormas Reaksioner
2	Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)	Ketidakadilan (<i>Un-Justice</i>) Tolak Otonomi Khusus <i>Free West Papua/Papua merdeka</i>
3	Masyarakat Papua: Anti-Rasisme	Otonomi Khusus Habis Papua Merdeka Kami Bukan Bangsa Monyet Kami Manusia Mobilisasi (<i>Mobilization</i>)

Dalam diskursus alternati lain (*Hypomnema*) sebagai perawatan diri dan pembangunan catatan permanen yang menengahi hubungan untuk diri sendiri Jacky (2015). *hypomnema* tidak memerlukan konfirmasi maupun validasi. Jadi, mereka yang oposisionis tentu tidak memiliki legitimasi, namun tetapi bergerak erena perlawanan aktif dengan diskursus alternatif sebagai mekanisme perlawanan Dwi Vellienda (2020).

Sokrates Sofyan Yoman memiliki resistensi diri terhadap diskursus alternatif lain. Menekankan bahwa negara “tidak boleh atur kami termasuk negara”, “NKIR harga mati”, “saya bukan pendatang disini”, “saya bukan penumpang”, “saya bukan terdampar”, “tidak boleh belenggu-belenggu aturan”, “negara Indonesia kolonial, “dia punya aturan memaksakan kami untuk ikut mereka”, mereka citpakan “mitos-mitos, “stigma-stigma”, “label-label”, (makar, KKB, teroris) “mereka perilaku pembunuh dan mengganggu oran itu sebagai teroris”, “mereka sebenarnya teroris”, “rasis”, “fasis”, “kita lawan”, “teroris itu bakar-bakar”, “bom-bom”,

“mereka memelihara teroris”, “membangun diri kami sendiri ditas tanah leluhur kami sendiri.

Dwi Vellienda (2020).

Sokrates Sofyan Yoman memiliki resistensi diri terhadap diskursus alternatif lain. Menekankan bahwa negara “tidak boleh atur kami termasuk negara”, “NKIR harga mati”, “saya bukan pendatang disini”, “saya bukan penumpang”, “saya bukan terdampar”, “tidak boleh belenggu-belenggu aturan”, “negara Indonesia kolonial, “dia punya aturan memaksakan kami untuk ikut mereka”, mereka citpakan “mitos-mitos, “stigma-stigma”, “label-label”, (makar, KKB, teroris) “mereka perilaku pembunuh dan mengganggu oran itu sebagai teroris”, “mereka sebenarnya teroris”, “rasis”, “fasis”, “kita lawan”, “teroris itu bakar-bakar”, “bom-bom”, “mereka memelihara teroris”, “membangun diri kami sendiri ditas tanah leluhur kami sendiri.

Menyinggung ideologi pencasila dalam pandangan Handoyo melihat sebuah “*common denominator*” artinya angka-angka pecehan namun ditranformasikan dalam “kebinekaan” dan itu menjadi persoalan utama. Lalu, “Pertarungan” sebab ideologi berwatak “integralistik”, bahkan di dalam berisi “artifisialitas politis” yang artinya rekayasa. Dan ideologi memiliki resistensi yang kuat tergantung pada penguasa Ismail (2020). Eko Handoyo (2018). Koheren dengan perspektif Sofyan, maka kekuasaan memelihara “rekayasa” melegalkan melalui model-model diskursus/atau hubungan dalam penelitian, sesungguhnya “diskursus rasisme” dipelihara kekuasaan dominan”.

Hal yang serupa dengan studinya J. Scott (1970). “Publik Trancripts dan Hidden Transcripts” membedah proses hubungan kekuasaan dan ideologi ke dalam dua lapis kenyataan. Dua point yang menjadi titik pemikiran. pertama adalah

lapisan formal (*public transcripts*) dan lapisan. Kedua, realitas yang tersembunyi (*hidden transcripts*). *Public transcripts* merupakan interaksi terbuka antara kelompok subordinat dan kelompok yang mengsubordinasinya. Sebuah transkrip tidak hanya mencakup perkataan, juga tindakan atau tingkah laku tertentu. realitas yang tersembunyi (*hidden transcripts*) adalah ekspresi diri seperti desas-desus, gossip/complain.

Merefleksikan *Public transcripts* dominasi jakarta terhadap Papua. Dihadapan pemerintah daerah banyak menerima kebijakan-kebijakan yang diselimuti kekuatan dominan. Keberadaan pemerintah daerah before of *Public transcripts* menerima bentuk-bentuk kebijakan seperti Otonomi Khusus (Otsus), Pemakaran Baru (Pambar), Trans-Papua/Pembangunan (*Trans-Papuan/building*), Por-Integrasi (*Pro-Integration*), pro penerimaan konsep “Ke-Indonesia-An” (*Receive concept of Indonesian*).

Lanjut, *Hidden transcript*/kenyataan yang tersembunyi atau menyembunyikan diri dari masyarakat Papua termasuk sebagian elit politik mustahil untuk menerima integrasi dengan Indonesia. Hibritas pemerintah menghendaki sinkron dengan dengan inferio/posisi tersembunyi. Behavior pemerintah daerah, para intelektual aktivis, serta masyarakat memiliki *hidden transcripts*. Kata Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa orang Papua “Orang Papua Belum Diindonesiakan dengan Baik” melalui *channel* Mata Najwa (21 Agustus, 2019). Termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) juga mendukung aspirasi masyarakat. Termasuk pergerakan OPM dan AMP, Parlemen Nasional West Papua (PNWP), *United Liberation Movement for West Papua* (ULWP), Kepolisian Negara West Papua (KNWP), Negara Federal Republik Papua. Dari berbagai pergerakan

ini merupakan bagian dari *hidden transcript*/kenyataan yang tersembunyi.

Diskursus rasisme sejak terjadinya “Westernisasi” Barat ke Timur, termasuk integrasi Papua ke Indonesia tidak terlepas diskursus rasisme. diskursus rasisme tersebut akuisisi yang terhegemoni dan menjadi stigmatisasi dari melalui konsensus umum dalam. Lebih lagi, proses realisasi dalam konstruksi sosial dalam rutinitas.

Berhubungan dengan diskursus rasisme KKB/KKBS Menjadi “Teroris” AMP juga memiliki diskursus alternatif lain yaitu “Militer Indonesia Terorist Bagi Papua”. Sikap ini merupakan oposisionis terhadap kekuasaan mereproduksi diskursus baru.

Dalam hal ini, diskursus menjadi jalan masuknya semua tindakan yang aktif. Dalam pandangan Foucault *discipline and punishment* diimplementasikan untuk mengontrol mereka yang dianggap mengganggu ketertiban. Secara praktikal, melihat penangkapan Tahanan Politik (Tapol) diawali dengan diskursus rasisme terhadap anti-rasisme di Papua mereka diskursus sebagai tindakan “Anarkis”, “Makar”, “Provokasi” “Mengompori”. Memang, penangkapan 7 orang bagian dari praktis diskursus yang dijadikan sebagai tontonan ketika jebloskan ke dalam “kerangkeng besi”.

Ketika ada pengaplikasian *discipline and punishment* Maka sistem pengawasan modern seperti kata Foucault *panopticon* diterapkan tanpa harus pengawasan secara fisik dari sekuriti. Jadi, subjek merasa diawasi di tingkat pikiran sehingga perilaku terkontrol dengan adanya *panopticon* tersebut.

Dipertajam dalam bahasanya, Erving Goffman bahwa adanya *setting* “dramaturgis” yang dimainkan oleh oposisionis sebagai *self-presentation* dalam rangka menampilkan *front of*

personal/subordination stage citra yang diinginkan oleh kekuatan dominan/*audience*. Terlepas dari *self-representation*, *behavior* oposisionis memiliki memiliki kekhasan yakni panggung belakang *back stage* dimana menampilkan orinalitas/otentitas pergerakan oposisionis, Fitriah (2017). Kelakuan oposisionis selalu menghindari dari eksistensi dirinya di hadapan kekuasaan dominan sebab kekutaan subordinasi mengetahui betul kekuatan dirinya bahwa tidak dapat membendung kekuatan superstruktur.

Dalam konteks diskursus alternatif lain dipamah sebagai perlawanan aktif. Subjek oposisionis perlu perhatikan bahwa perlawanan saat ini tidak hanya imperialisme penjajahan dan ekspansi kolonialisasi. Perlawan lebih kepada perbudakan “sistem kapitalis” seluruh sistem dikuasai efek praktik kapitalisme global atau *one dimension* (satu dimensi) dalam bahasa tokoh mazhab kritis Marcuse (2006). Lebih penguasaan pada Sumber Daya Alam (SDM) seperti kata Jacky. Dalam praktik, perkembangan suatu negara istilah diskursus “inti”, “periferi” serta “semi periferi”. Merupakan sebuah strategis sistem kapitas terhadap negara lain.

Dalam konteks ini, Kunci perlawanan sependan (ekuilibrium) masyarakat modernisme antara lain: (a) “Diplomasi”, langkah diplomasi berhubungan dengan spektrum politik. (b) “Peningkatan potensi SDM”, dalam bahasanya Derrinda “Dekonstruksi” pemaknaan ulang baik melalui “karya kreativitas” maupun “gaya hidup (*lifestyles*)”. (c) “bebas dari konsep tertentu yang membelenggu”, karenanya manusia seringkali korban diskursus/wacana maka harus ada emansipasi dari konsep. (d) “manusia yang berotonom” Otonomi subjek tidak lagi tergantung (*dependent*) terhadap arus diskursus/wacana komunal/publik namun lebih ke independen (*independent*)

yang bebas dari konstruksi realitas yang semu atau sama-samar. (e) masyarakat hidup “nomaden” bukan hal mudah bagi aktivitas revolusi, namun perlu dipertimbangan kehidupan nomaden.

Absurd/sia-sia, jikalau perlawanan lebih menekankan pada revolusi mencetak *goal* dan seolah-olah *one path* revolusi tanpa ada jalan alternatif lain. Dalam bahasa Foucault perlawanan tanpa harus konfrontasi fisik namun lebih kepada perlawanan aktif melalui diskursus alternatif/*hypomnema* subjektif yang lebih berotonom baik melalui dunia maya (*Blogger*) maupun dunia nyata (*Private space/intersubject*).

Diskursus Tandingan (*Counter Discourses*). Kemajemukan wacana dalam suatu masyarakat dapat diciptakan hanya kalau terdapat usaha-usaha yang berkesinambungan untuk membatasi hegemoni penguasa melalui penciptaan “wacana-wacana tandingan” (*counter discourses*) Jacky (2015). Tabel 3 Diskursus tandingan (*Counter Discourses*).

1.3 Tabel. Diskursus Tandingan (*Counter Discourse*)

No	Diskursus Tandingan	
1	M. Jacky	Elit politik Lokal Persoalan Internasional Korban Diskursus
2	Rocky Gerung	Hak Asasi Manusia/HAM <i>New Kind Of Nationalism</i> (Nasionalisme Baru) Ketidakadilan
3	Salim Said	Masalah Internasional Ketidakadilan Bangsa ini Tidak Suka Sejarah

Diskursus tandingan /*counter discourses* sendiri dipahami sebagai pengetahuan secara akademis dan objektif. Yang artinya, tidak memihak terhadap diskursus resmi dan diskursus alternatif lain (*Hypomnema*). Secara netralitas, diskursus

tandingan melihat bahwa kekuasaan dominan dan subordinan didalamnya arena pergulatan ideologi (*struggle fielding*). Dengan kata lain, kekuasaan ingin singkirkan mereka yang tidak sepaham dengan ideologi dominan, sementara diskursus alternatif lain memandang bahwa diskursus resmi merupakan sebuah penindasan, distorsi mitos bahasa (Linguistik), serta negara membuat orang menjadi robot atau mesin untuk dijalan sesuai kepentingan kekuasaan.

Westernisasi Nusantara kaitan dengan New Guinea (Papua). Gambaran umum bagaimana memahami supremasi ras “Kaukasoid” mendominasi ras “Mongoloid”, dan “Negroid” seperti dalam pandangannya Said. Dan Said menggambarkan konsep Orientalisme “Barat” ke “Timur”, dimana Barat memposisikan diri lebih “Hebat” ketimbang Timur maka ada terminologi “Kita” tidak sama dengan “mereka. ketika “Barat” masuk ke “Timur untuk melakukan suatu penjajahan. Penjajahan yang sama terjadi dalam terminologi “Indonesia barat” ke “Indonesia Timur” saat ini. Supremasi Barat memposisikan diri lebih “mapan” dan “irasional” jika membandingkan (komparatis) dengan Timur. bagan perkembangan Barat ke ke Indonesia hubungan dengan Papua.

Lalu terjadinya bentuk akomodasi, yaitu kelangsungan akulturasi dua unsur yang berdeda serta amalgamasi untuk membingkai kekuatan politik dalam unit keluarga. sehingga relasi penjajahan semakin langgeng.

Sangat menyedihkan lagi, masyarakat Papua korban diskursus politik dari orang “Barat”, terutama Belanda yang mendirikan “Nasionalisme Papua” yang kini menjadi ideologi yang membelenggu, memeras, serta ratapan bagi mereka yang hidup maupun meninggal dunia. Secara kontekstual, Papua juga korban dari Indonesia sejak sampai saat ini.

Korban tidak hanya orang Papua, melihat persoalan secara netral, pro-integrasi dan kontra integrasi pun juga menjadi korban diskursus, korban ideologi/mitos. Barthes (2013). Satu sisi, klasifikasi ras kaukaosid, mongoloid, serta negroid tidak dipahami sebagai epitemologi, namun lebih kepada diskursus politik seperti dalam penelitian ini.

KONKLUSI

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Michel Foucault mengaplikasikan konsep *power of knowledge*, sebagai pisau untuk membedah fenomena rasisme mahasiswa Papua di Kota Surabaya pada 2019 silam. *Governmentality* merupakan saluran/*channel bio-power/bio-politik* untuk pengontrolan *dicipline* atas dirinya dan eksekusi hukuman/*punishment* terkendornya bentuk *dicipline* terhadap *powerless*. *Power of knowledge* bagian dari kunci masuknya subjek yang berotonom dan memiliki *hypomnema* tersendiri. Sebab untuk menjinakan terhadap subjek melalui mekanisme bahasa sebagai pilihan untuk membentuk diskursus dengan *based power of knowledge*. *Counter dicourses* juga memiliki kepribadian yang berbeda terhadap diskursus dominan dan alternatif.

Dalam penelitian ini ada tiga bagian pertama diskursus resmi, kedua diskursus alternatif lain, ketika diskursus tandingan. Diskursus resmi Pertama, diskursus pemerintah resmi “Otonomi Khusus”, “Pembangunan”, “Kelompok Kriminal Bersenjata / teroris”, “Papua Kondusif”, “Keadilan”, “Persatuan”, “Otonomi Khusus”, “Diperhatikan Secara Kompreshensip”, “Papua Bagian Dari Integral NKRI”, “Otonomi Sebagai Solusi”. Pelaku rasisme “Monyet” “Provokasi”, “Hoak”, kelompok yang mereproduksi diskursus rasisme politik diskursus masyarakat pro-integrasi; “Satu-Kesatuan”, “Cinta Damai”, “Papua Bagian Dari

Indonesia”.

kedua, diskursus alternatif seperti “Kami Ciptaan Tuhan Bukan Monyet”, “Ormas Reaksioner”, “Keadilan”, “Ketidakadilan”, “Tolak Otonomi Khusus”, “Papua Merdeka”. Diskursus masyarakat Papua anti-rasisme “Otonomi Khusus Habis Papua Merdeka”, “Kami Bukan Bangsa Monyet, Kami Manusia”, “Mobilisasi”, diskursus aspirasi masyarakat Papua ingin emansipasi dari korban diskursus.

Ketika, diskursus tandingan (*counter discourses*) secara objektif diantaranya “Persoalan Internasional”, “Korban Diskursus”, “Hak Asasi Manusia/HAM”, “*New Kind Of Nationalism*”, “Ketidakadilan”, “Bangsa ini Tidak Suka Sejarah”, konter diskursus pandangan kaum intelek dari pinggiran kekuasaan.

Keadaan semu ini, memverifikasi istilah yang dikatakan Foucault sebagai “heterotopia”—lawan kata dari “utopia”. Heterotopia dimana suatu dimensi ruang tidak ada dalam ruang nyata dan ruang ini telah hadirkan pemerintah untuk menunggangi masyarakat. Dengan kata lain, suatu meta-narasi (*Grand Narrative*) yang mengebor-geborakan sepanjang massa, padahal sudah basih, namun terus dihangatkan/simulasi hingga bius tanpa merasa dibius. kontradiksi-kontradiksi dengan adanya praktik diskursus resmi, pola hegemoni. Dalam perspektif Foucauldian, Agamben (1995). Memberitahukan dalam bukunya “*Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*”. Negara yang berdaulat dengan praktik Liberalisasi demokrasi menyebabkan hak-hak “*Civil Society*” seharusnya secara konstitusional diperhatikan, terjadi keadaan sebaliknya yaitu justru muncul *gap* kesejangan dan disparitas sosial yang merajalelah.

Korban ada dua sisi, satu sisi korban oposisionis bagian dari korban

diskursus rasisme. sisi lain, korban ideologi kekuasaan. Dalam hal ini, diskursus terus melawan dengan memiliki diskursus alternatif lain, sementara korban ideologi tidak merasa korban dan tindakan terus dilakukan atas apa yang yakini sebagai “kebenaran” untuk diperjuangkan. Keduanya, sama-sama korban dan saling mengorbankan yang lain atau memproduksi dan reproduksi.

Kerap kali, kekuasaan berupaya pubrifikasi “rekayasa” dan “konsipirasi” untuk menambal “ falsifikasi ideologi”. Lebih tragis lagi, ideologi diartikan sebagai “kebenaran” diperkuat melalui ratifikasi regulasi dan *common senses* atau konsensus bersama. Amplas inferior menjadi “pingmen kekuasaan”, “tempat sampah ideologi dominan” penguasa terus tendensius jika inferior keluar rel dari limit pembatas. Serta, didiskursuskan istilah paling umum serpeti “Makar”, “terpapar radikalisme”, “intoleran”, “anti-pancasila, “anarkis”, “marxian”, “komunis serta gerakan”extream kiri’.

Lebih penting, manfaat (ulitarian) yang lain dalam penelitian ini, kontribusi atas “ kebebasan” dari kesadaran semu (*unconscious*) dari ambiguitas diskursus. kesadaran (*Councious*) yang otentik diskursus yang “membelenggu” dalam kehidupan sehari-hari yang sudah mengalami proses internalisasi.. Untuk itu, pernyataan subjek dipahami sebagai gejala (*symtobems*) perlu disadarkan. Kesadaran ini bagian dari pencerahan (*enlightment*) yang keluar dari bukan tetap dalam kekuasaan yang memberikan mitos-mitos yang memperkuat posisi mereka. Pencerahan (*aufklarung*) telah terbelenggu dengan adanya sistem raksasa yaitu “Kapitalis” yang membelenggu atau mematihkan subjek.

Saran dan Kritik

studi ini fokus kepada

pernyataan-pernyataan subjek terkait dengan ujaran rasisme/diskursus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Maka, perlunya penelitian dari berbagai sudut pandang keilmuan masing-masing yang berbeda. Peneliti menyadari betul bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dari segi data, bahasa, isi artikel. Maka dari itu, peneliti terbuka untuk kritik demi membangun kekayaan keilmuan khusus teori yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, Giorgio. 1995. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. a cura di M. C. Aesthetics. Stanford University Press.
- Alam, Sukma. 2020. «Jurnalisme Damai dalam Pembungkahan Berita Rasisme Mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com». *Jurnal Pewarta Indonesia* 2(2):2–16.
- Alinea. 2019. «Polisi dapat gunakan pendekatan adat dalam penanganan Papua». *media massa*.
- Althusser, Louis. 2015. *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*. a cura di C. H. Pontoh. IndoPROGRESS,.
- Anderson, Benedict. 2019. «Imagined Communities Reflection on the Origin and Spread of Nationlism». *We Average Unbeautiful Watchers* 152–200.
- Anugerah, Boy. 2019. «Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi». *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI* 7(4):1–15.
- Asih, Imalia Dewi. 2015. «Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara “Kembali Ke Fenomena”». *Jurnal Keperawatan Indonesia* 9(2):1–6.
- Barthes, Ronaland. 2013. *Barthes’ Mythologies Today Readings of Contemporary Culture*. a cura di P. B. and J. McDougall. New York and

- London.
- BBC. 2019a. «Kerusuhan di Papua “membuat khawatir” warga pendatang». 1.
- BBC. 2019b. «Polisi sebut kelompok bersenjata Papua bunuh 20 orang sepanjang 2019, OPM anggap data polisi diskriminatif». *media massa*.
- Bland, Ben. 2020. *Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake*. Australia: 1 September 2020.
- Budiman. 2017. «Faktor yang Mempengaruhi Minimnya enaga Pendidik di Sekolah Dasar 56 Kelurahan Soop Distrik Kepulauan Kota Sorong». 2(2):1–11.
- CCN. 2018a. «Trans Papua, Proyek Ambisi Jokowi di Indonesia Timur». *media massa*.
- CCN. 2018b. «Wiranto Sebut RI Bakal Terima Anggota KKB Papua yang Insaf». *media massa*.
- ccnIndonesia. 2019. «Massa Anti-rasisme Gelar Aksi di Tiga Kabupaten di Papua». *media massa*.
- CnbcIndonesia. 2019. «“papua dan papu barat kondusif”». *media massa*.
- CnnIndonesia. 2019. «Luhut: Kalau Enggak Ada Gejolak, Bukan Papua Namanya». *media massa*.
- Darnell, Simon C. 2007. «Playing with race: Right to play and the production of whiteness in “development through sport”». *Sport in Society* 10(4):560–79.
- Day, Ketih Foulcher and Tony. 2002. «Clearing a Space. Postcolonial Readings of Modern Indonesian Literature». *Archipel* 70(1):1–392.
- Derrida, Jacques. 2019. *Theory & Practice*. a cura di G. B. & P. Kamuf. Chicago: Printed in the United States of America.
- Dewanti, Siti Chaerani. 2019. «Pembatasan Internet Dalam Mengatasi Konflik Di Papua». *Jurnal Info Singkat* 11(17):1–6.
- Doidge, Mark. 2015. «‘If you jump up and down, Balotelli dies’1: Racism and player abuse in Italian football». *International Review for the Sociology of Sport* 50(3):249–64.
- Dwi Vellienda, Churnia. 2020. «Panoptikon dan hypomnemadalam pendisiplinan tubuh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan». *Jurnal Paradigma* 8(1):1–16.
- Eko Handoyo, Rahmat Petuguran dan Heri Rohayuningsih. 2018. *Pertarungan Ideologi Pancasila di Tengah Kepungan Ideologi-Ideologi Dominan*. Semarang: Unnes Press.
- Engels, Frederick. 2007. *on mar’s capital*. Vol. 6. a cura di E. Cahyono.
- Ensieh Sahabanirad. 2017. «Discourse, power and resistance in Nadine Gordimer’s occasion for loving: A foucaultian reading». *3L: Language, Linguistics, Literature* 23(3):2–13.
- Febrianti, Sekar Wulan, Ajeng Sekar Arum, Windy Dermawan, e Akim Akim. 2019. «Penyelesaian Konflik Internal antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatisme di Papua melalui Mekanisme Horse-Trading». *Society* 7(2):83–100.
- Foucault, Michel. 1966. *The Order of Thing: An archaeology of the human sciences*. Vol. 6. a cura di Gallimard. London and New York: British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library.
- Foucault, Michel. 1972a. *Power/Knowledge Selected Interviews and Writing 1972-1977*. Colin Gorb. United States of America.
- Foucault, Michel. 1972b. *The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language*. A. M. Sher. news York.
- Foucault, Michel. 1975. «Society must be defended: Lectures at the College de France 1976-76». *Law, Culture and the*

- Humanities* 1(1):1–346.
- Foucault, Michel. 1976. *The Order OF Things An Archaeology of the Human Sciences*. Vol. 1. news York.
- Foucault, Michel. 1997. *The Foucault Reader by Michel Foucault*. a cura di P. Rabinow. Chicago: Cornell University Press.
- Foucault, Michel. 2003. *The Birth of the Clinic*. A. M. Sher. London and New York.
- Foucault, Michel. 2012. *Discipline & Punish Th Birth Of The Prison*. a cura di 2012) Vintage (April 18. news York.
- Foucault, Michel. s.d. *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*. Vol. 1. a cura di R. Howard. news York.
- Foucault, Michel. s.d. *The Use of Pleasure Volumes 2 of The History of Sexuality Michel Foucault*. Vol. 2. a cura di R. Hurley. news York: A Division of Random House, Inc.
- Groeveboer, Kees. 1999. «Politik Bahasa Kolonia! di Asia* Bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris dan Prancis». *BRILL* 1(2):1–22.
- Hai.grid.id. 2021. «Viral Ujaran Rasisme Netizen kepada Patrick Wanggai di Media Sosial». *media massa*.
- Hasrah, Mohd Tarmizi. 2013. *Arkeologi, Sejarah dan Budaya*. a cura di N. H. S. N. A. R. Z. R. M. Samsudin, M. T. Hasrah, e Institut. Malaysia: S&T PHOTOCOPY CENTER Jalan Reko, Sungai Tangkas 43000 Kajang, Selangor.
- I Ngruh Suryawan. 2014. «Deain Besar Penataan Daerah dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat». *Jurnal studi Pembangunan Interdisiplin XXIII*(No.3):1–18.
- Indosport. 2019. «Buntut Rasisme Terhadap Orang Papua, Titus Bonai Serukan Pesan Damai». *media massa*.
- Islam, N. 2012. «REPRESENTASI ETNISITAS DALAM BINGKAI BHINNEKA TUGGAL IKA DI MEDIA (Studi Etnis Papua dalam Bingkai Bhinneka Tuggal Ika Pada Program TransTV âKeluarga Minusâ)». *Jurnal Dakwah Tabligh* 13(2):1–23.
- Ismail. 2020. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Medan.
- J. Sollewijn Gelpke. 1993. «On The Origin Of The Name Papua». *Bijdragen* 12(3):2–16.
- Jabri, Vivienne. 2007. «Michel Foucault's Analytics of War: The Social, the International, and the Racial». *International Political Sociology* 1(1):67–81.
- Jacky, Muhammad. 2014. «Nasionalisme Materialistik Analisis Diskursus Aliran Politik Indonesia» a cura di M. Jacky. *media massa* 1–320.
- Jacky, Muhammad. 2015. *ORMs Online Research Methods*. surabaya.
- Jawapos. 2019. «Wiranto Sesalkan Demonstrasi di Papua, Kenapa Brutal». *media massa*.
- Johanes Supriyono. 2014. «Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara». *Jurnal Ultimuna Humaniora* 2(1):1–25.
- Kaltim.tribunnews. 2021. «New Video Mahfud MD umumkan Pemerintah Tetapkan KKB Papua sebagai Teroris». *media massa*.
- Katharina, Riris. 2019. «Insiden Asrama Mahasiswa Papua Di Surabaya». *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11(16):1–6.
- Kholill, Munawar. 2016. «Naskah-Naskah Islam Papua». *Jumantara* 7(1):1–18.
- Kompas. 2019. «Stafsus Presiden Minta Polisi Tangkap Pelaku Persekusi dan Rasisme di Asrama Papua». *media massa*.
- Kompasiana. 2016. «Pemberontakan Operasi Papua Merdeka dan Cara

- Penanggulangannya». *media massa*.
- Kusmiarti, Ulfa. 2020. «Framing Pemberitaan Kompas . com Dalam Kasus Diskriminasi dan Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019». *Jurnal Commercium* 3(3):13.
- Lentin, Alana. 2004. «Racial States, Anti-Racist Responses: Picking Holes in ‘Culture’ and ‘Human Rights’». *European Journal of Social Theory* 7(4):427–43.
- Liputan6. 2019. «FOTO: Protes Insiden Surabaya, Mahasiswa Papua Berunjuk Rasa di Bali». *media massa*.
- Llopis-Goig, Ramon. 2009. «Racism and Xenophobia in Spanish Football: Facts, Reactions and Policies». *Physical Culture and Sport. Studies and Research* 4XLVII(1):1–9.
- Lyotard, Jean-François. 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis,: the University of Minnesota Press.
- Macey, David. 2009. «Rethinking Biopolitics, Race and Power in the Wake of Foucault». *Theory, Culture & Society* 26(6):186–205.
- Mahmud, M. Irfan. 2014. «Commodities and Trade Dynamics in Papua In The Historic Period». *Berkala Arkeologi* 34(2):1–16.
- Malak, Stepanus. 2012. *Otonomi Khusus Papua*.
- Marcuse, Herbert. 2006. *One-Dimensional Man (1964)*. Routledge.
- Mashad, Dhurorudin. 2020. *Muslim Papua Membangun Harmoni Berdasar Sejarah Agama di Bumi Cendrawasih*. a cura di Artawijaya. Jakarta Timur: Pustaka Al-Alkautsar.
- MediaIndonesia. 2021. «DPR: Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan». *media massa*.
- MediaIndonesia. 2019. «Warga Menggelar Aksi Solidaritas untuk Papua Damai». *Politik dan Hukum*.
- Mendieta, Eduardo. 2004. «Plantations, ghettos, prisons: US racial geographies». *Philosophy and Geography* 7(1):43–59.
- Mercer, Joyce Ann. 2020. «#BlackLivesMatter in Religious Education: The REA Statement on the Murder of George Floyd». *international* 115(social issue):1–6.
- Mujib, Abdul. 2015. «Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam». *Jurnal Pendidikan Islam* 6(November):167–83.
- Nasioanl.tempo. 2020. «ngacara Sebut Proses Hukum 7 Tapol Papua Tak Adil». *media massa*.
- Nasional.tempo. 2019. «Lukas Enembe Pertanyakan Kapasitas Lenis Kogoya Bicara Papua». *media massa*.
- Pamungkas, Cahyo. 2015. «Sejarah Lisan Integrasi Papua Ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana Pada Masa Trikora Dan Pepera». *Paramita: Historical Studies Journal* 25(1).
- Ploeg, Anton. 2002. «DE papoea: What’s in a name?» *Asia Pacific Journal of Anthropology* 3(1):2–26.
- Rival, ndra Putra Yastika. 2013. «Efektivitas Rezim UEFA Dalam Menangani». 1223–39.
- Rohim, Nur. 2015. «Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan». *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):1–21.
- Said, Edward W. 2003. *Said, Edward (1977) Orientalism*. London: Penguin. London: Penguin Group.
- Sanusi, Irfan. 2010. «Membedah Diskursus Dan Berkreasi Dalam Ranah Pluralitas: Rereading Arkeologi Pengetahuan». *Journal Ilmu Dakwah* 4(15):2–17.
- Saputra, Muhammad Ali. 2017. «Menguatnya Politik Identitas Dan

- Problem Kerukunan Beragama Di Manokwari». *Mimikri* 3(1):1–13.
- Scott, James C. 1970. *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistan*. United States of America: Yale University.
- Sholahuddin, Nevy Rusmarina Dewi & Ahmad. 2020. «Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menjawab Tantangan Multikultural di Indonesia : Studi Kasus Papua». *Jurnal Pemikiran Politik Islam ISSN* 3(1):12.
- Sihombing, Jene Irene. 2016. *Gambaran Tipe Wajah Mhasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan Yang Bersuku Batak Toba Tahun 2016*. Medan.
- Sonu, Debbie. 2020. «Making racial difference: A Foucauldian analysis of school memories told by undergraduates of color in the United States». *CUNY Academic Works* 1–16.
- Suara. 2019. «Sebut Benny Wenda Provokator, Wiranto: Seakan Kita Telantarkan Papua». *media massa*.
- SuaraPapua. 2019. «Gubernur Papua: Kami Bukan Bangsa ‘Monyet’, Kami Manusia!» *media massa*.
- Sugandi, Yulia. 2008. «Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua». *Friedrich Ebert Stiftung* 1–30.
- Sukmawati, Anggy Denok. 2018. «Papua dari Masa ke Masa: “Zaman Batu” hingga Masa Kini». *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 20(3):1–15.
- Sumanti, Justianus Joshua, Agusly Irawan Aritonang, e Chory Angela Wijayanti. 2018. «Representasi Ras Kaukasoid dan Ras Negroid Dalam Film Eye In The Sky». *E-Komunikasi* 6(2):1–11.
- Tirto.id. 2018. «Beda Soekarno dan Soeharto Dalam Memperlakukan Papua».
- Tribunnews.com. 2021. «Ambrocius Nababan Klaim Unggahan Rasisme kepada Natalius Pigai Sebagai Satire.»
- Tribunnews. 2019a. «Menko Polhukam Wiranto Sebut Pemerintah Kantongi Nama Aktor Rusuh Papua, Sengaja Biar Kacau». *media massa*.
- Tribunnews. 2019b. «Sejumlah Masyarakat Papua Gelar Aksi di Depan Istana, Serukan Pesan Damai». *media massa*.
- TribunNews. 2019. «Aliansi Masyarakat Peduli Papua Gelar Aksi Damai, Nyanyikan Lagu Daerah Papua». *media massa*.
- Ulfah, R., Ike Atikah Ratnamulyani, e Maria Fitriah. 2017. «PHENOMENON OF USE PHOTO’S OF THE DAY OUTFIT IN INSTGRAM SELF AS A MEDIA PRESENTATION (Study of Communication In approach Dramaturgy Erving Goffman) ». *Jurnal Komunikatio* 2(1):1–14.
- Wiradnyana, Ketut. 2018. *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Jakarta.
- Yambeyapdi, Ester. 2018. «Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif». *Indonesian Historical Studies* 2(2):1–7.

